



KOMDIGI

DIREKTORAT JENDRAL
INFRASTRUKTUR DIGITAL



LAPORAN KINERJA 2024

**BALMON
BANJARMASIN**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berakuntabilitas, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

☎ 0511 - 3258346

✉ upt_banjarmasin@postel.co.id

📍 Jl. Pramuka No. 22 A Banjarmasin

🌐 [balmon_banjarmasin](https://www.balmon-banjarmasin.com)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dengan cara monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban, penanganan gangguan,

kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat dilihat dari sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2024.

Tujuannya adalah memastikan penggunaan spektrum berjalan sesuai dengan ketentuan, mendukung layanan telekomunikasi yang berkualitas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penilaian capaian

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIMAKSUD TERDAPAT DALAM TABEL DIBAWAH INI:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Reaksi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100 %	100 %	100 %
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio	100 %	117,50 %	117,50 %
		3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100 %	100 %	100 %
		4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100 %	107,53 %
		5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100 %	105,26 %
		6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100 %	134,17 %	134,17 %
		7. Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100 %	100 %	100 %
		8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %
		9. Bimbingan Teknis SRC/LRC	100 %	145 %	145 %
		10. ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100 %	142,50 %	142,50 %
		11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,89	90,43	100,60 %
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100	100	100 %



Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

CAPAIAN KINERJA BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN

PADA SASARAN PROGRAM I “MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI”

IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah mencapai target 100% untuk monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota dengan wilayah kerja sebanyak 13 kabupaten/kota dan target 100% untuk monitoring rutin

pita frekuensi marabahaya setiap bulan dengan memanfaatkan stasiun transportable yang ada. Dengan demikian target untuk IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota telah terpenuhi dan telah tercapai 100%

IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio

Pada perjanjian kinerja tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin ditargetkan untuk melakukan pemeriksaan stasiun radio sebesar 100%. Kegiatan yang mencakup pemeriksaan stasiun radio (*remote site*, *open shelter* dan pengukuran

stasiun siaran) dan monitoring alat perangkat telekomunikasi telah berhasil dilaksanakan. Target yang ditetapkan telah terpenuhi dan telah tercapai sebesar 117,50%.

IK-3 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

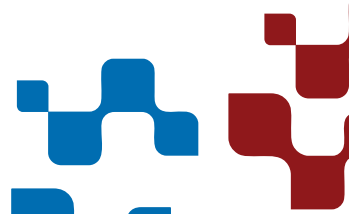
Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menargetkan penyelesaian 100% aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang masuk. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat lima aduan gangguan Spektrum

Frekuensi Radio yang seluruhnya telah ditindaklanjuti hingga selesai. Dengan demikian, tingkat penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada IK-3 mencapai 100%.

IK-4 Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi merupakan tindak lanjut dari observasi, monitoring frekuensi radio, standar perangkat pos dan informatika, serta validasi data pengguna spektrum frekuensi radio. Sesuai dengan perjanjian kinerja, pada tahun 2024 ditargetkan 100% pengguna frekuensi ilegal dihentikan pancarannya dan beralih menjadi legal. Selain itu, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak bersertifikat diupayakan untuk memperoleh sertifikasi atau, jika tidak memenuhi ketentuan, akan dimusnahkan dan diserahkan kepada Negara. Pada tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah menertibkan

60 frekuensi ilegal, di mana seluruhnya telah dihentikan pancarannya (*off air*) dan/atau memperoleh izin, sehingga dapat mencapai target 100%. Lebih lanjut lagi, dalam kegiatan penertiban Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi tersebut, sebanyak 7 (tujuh) unit berhasil ditertibkan dari total 7 (tujuh) unit yang menjadi target, sehingga juga dapat mencapai target 100%. Dengan demikian, realisasi IK-4 terkait Penertiban Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu sebesar 100%.



IK-5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Indikator kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) DI UPT bertujuan untuk mendukung kegiatan monitoring, pengukuran, dan identifikasi spektrum frekuensi radio. Dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 Target yang ditetapkan adalah 12 laporan serta tingkat keberfungsian

perangkat pendukung SMR dan alat monitoring/pengukuran sebesar 95%. Adapun realisasi kinerja yang diperoleh mencapai 100%, capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan capaian 105,26%

IK-6 Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

Dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024, telah ditetapkan target 100% terlaksananya Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dengan jumlah 12 kali pelaksanaan atau jumlah peserta sebanyak 319 peserta sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data yang telah diperoleh hingga akhir desember 2024, UNAR berbasis Computer Assisted Test (CAT) telah dilaksanakan sebanyak 12 kali, yang terdiri atas 2 (dua) kali UNAR non-reguler di Kota

Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong. Kemudian, untuk UNAR reguler telah dilaksanakan sebanyak 10 kali dengan jumlah total peserta sebanyak 428 peserta. Berdasarkan capaian ini, capaian kinerja yang diperoleh mencapai 134,17% melampaui target yang telah ditetapkan.

IK-7 Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL

Tahun 2024 target Perjanjian Kinerja (PK) 100% dari kegiatan Penanganan Piutang 100% dihubungi dan Koordinasi Pelimpahan Piutang ke KPKNL 100% sebanyak 4 (empat) kali kegiatan. Realisasi penyampaian piutang

melalui Pos, Email dan diantar langsung sebanyak 438 berkas (100%) dan Koordinasi Pelimpahkan Piutang ke KPKNL dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan (100%). Sehingga realisasi capaian 100%.

IK-8 Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik ditargetkan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dengan target peserta 100% dari wilayah kerja atau sebanyak 13 Kota/Kabupaten. Kegiatan sosialisasi pelayanan publik telah dilaksanakan dengan keikutsertaan 100 peserta dari 13 kabupaten kota yang terdapat pada wilayah kerja Balai Monitor SFR kelas II Banjarmasin, sehingga capaian 100%.

Survei Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dilakukan melalui survei mandiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin (aplikasi dari Direktorat Operasi Sumber Daya). Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil survei dengan jumlah responded sebanyak 124, diperoleh hasil mutu pelayanan sangat baik melalui nilai IIPP sebesar 3,93 serta IKM sebesar 3,92, capaian 100%

IK-9 Sosialisasi /Bimbingan Teknis SRC/LRC

Pada perjanjian kinerja tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin ditargetkan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk operator radio dinas maritim yakni Short Range Certification/Long Range Certification atau SRC/LRC dengan jumlah peserta minimal 40 peserta.

Berdasarkan data yang diperoleh hingga akhir tahun, tahun 2024, Balai monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC dengan jumlah peserta 58 orang. Dengan perolehan tersebut maka capaian indikator kinerja yang dicapai adalah sebesar 145 %.

IK-10 ISR Maritim Nelayan Program MOTS - IKRAN

Pada perjanjian kinerja Tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin ditargetkan dengan jumlah ISR Maritim Nelayan dan Program MOTS IKRAN sebanyak 40 izin. Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan akhir Desember 2024, izin

yang diterbitkan berjumlah 57 izin dengan rincian 11 izin stasiun radio (ISR) maritim nelayan serta 46 izin komunikasi radio perikanan (IKRAN). Dengan perolehan tersebut maka capaian indikator kinerja yang telah dicapai adalah sebesar 142,50%.

IK-11 Verifikasi Data Koordinat Site ISR

Berdasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2024, Pelaksanaan Verifikasi Data Koordinat Site ISR Tahun 2024 memiliki target sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Adapun data koordinat site ISR microwave link yang telah terverifikasi berjumlah sebanyak 7 (tujuh)

Kabupaten/Kota. Dalam hal ini pelaksanaan verifikasi data koordinat site ISR pada tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan atau dengan capaian kinerja sebesar 100%

PADA SASARAN PROGRAM 2:

“TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF”

Nilai Kinerja Anggaran UPT Banjarmasin Tahun 2024

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT merupakan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan terhadap pengelolaan anggaran selama tahun 2024 terhadap pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.

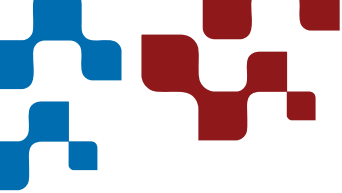
Adapun Nilai capaian Indikator Kinerja Anggaran UPT Tahun 2024 yang diperoleh adalah sebesar 90,43% dimana capaian ini berhasil melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89,89% sehingga capaian 100,60%.

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin untuk nilai capaian indikator pelaksanaan adalah 100 dari target yang ditetapkan sebesar 100.

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin hingga akhir Desember 2024 menunjukkan hasil yang signifikan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 11.282.042.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 11.239.219.385,- dengan tingkat persentase penyerapan mencapai 99,62%



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wabarokaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan dan pencetakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran dan kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja tahun 2024 kepada Dirjen SDPPI, serta berfungsi sebagai dokumen evaluasi internal untuk perbaikan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Laporan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain: Tugas Pokok dan Fungsi, Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dan juga berperan sebagai dokumen krusial dalam siklus perencanaan, memberikan umpan balik yang berguna untuk penyusunan rencana strategis dan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Penyusunan LAKIN dilakukan dengan cermat dan kolaboratif oleh seluruh Tim Kerja serta SubBagian Umum di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara *top-down* dan *bottom-up*, sehingga laporan ini dapat disajikan dengan faktual dan rinci, menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan, pengguna, mitra layanan, serta para pemangku kepentingan lainnya.



Dengan adanya laporan ini, kedepannya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya.

Terima kasih kepada seluruh tim di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin atas dedikasi dan kerja keras dalam menyusun LAKIN ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banjarmasin, Januari 2025
KABALMON SFR KELAS II BANJARMASIN

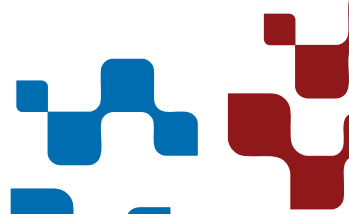

EDI MULYONO





DAFTAR ISI

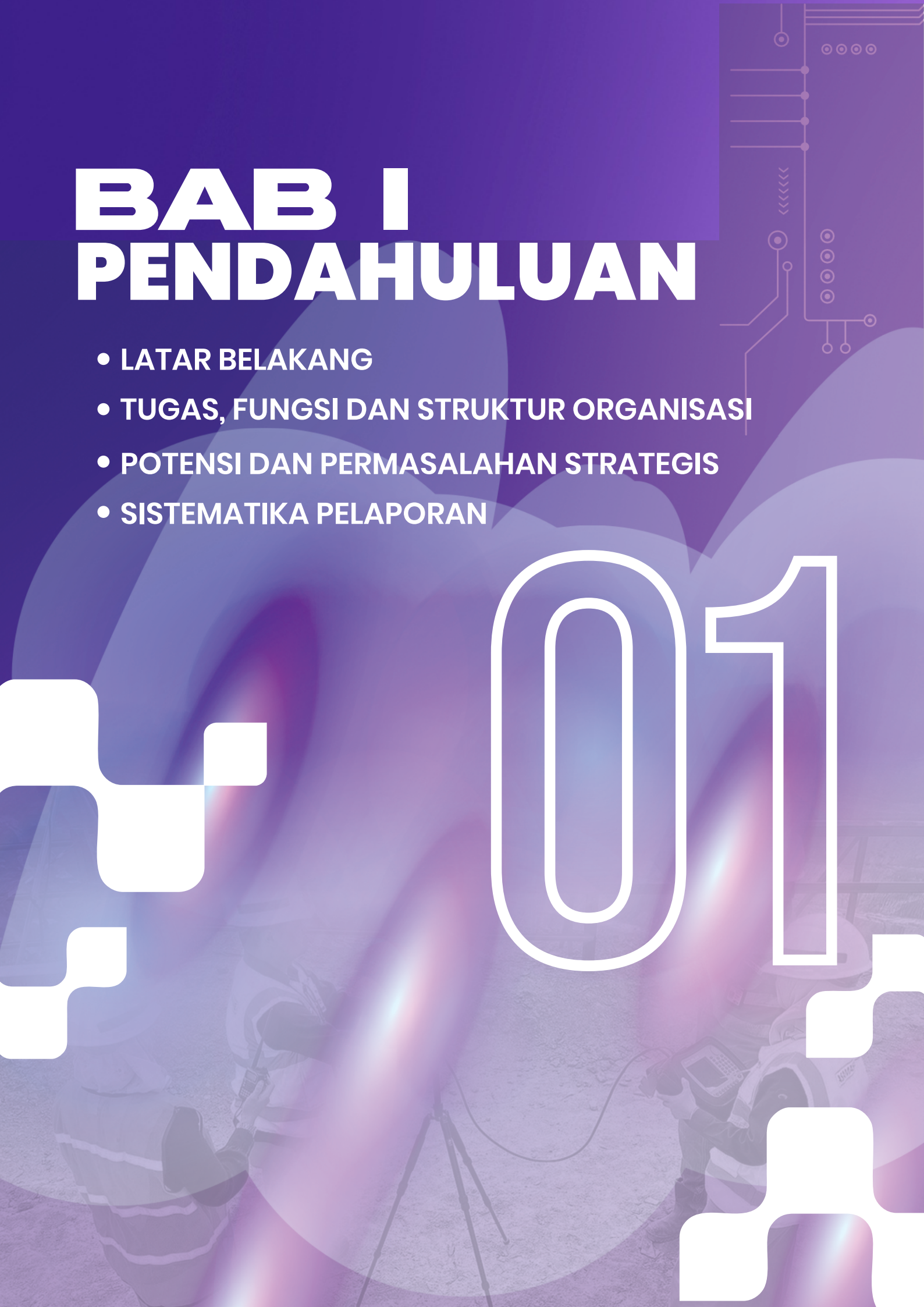
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	7
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	7
BAB II	
PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. SASARAN KINERJA	10
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	10
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	63
BAB IV	
PENUTUP	79



BAB I PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN

01



A. LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama dengan sumber daya alam terkandung di dalam tanah dan air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan masyarakat. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yaitu sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) memang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi sektor telekomunikasi di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang ditetapkan oleh Ditjen SDPPI, perusahaan dan institusi pengelola layanan telekomunikasi diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu, regulasi yang dikeluarkan oleh Ditjen SDPPI juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan para pengguna layanan telekomunikasi, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan fair bagi para penyelenggara layanan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan ketat, diharapkan sektor telekomunikasi dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di Indonesia.

Ditjen SDPPI juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang beredar di pasaran, untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkontribusi besar terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor telekomunikasi adalah nomor dua terbesar setelah minyak dan gas. Kedepan, upaya untuk mewujudkan industri komunikasi dan informatika nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan terus diupayakan dengan menjaga kepatuhan terhadap tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi dan penggunaan perangkat Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya terkait dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Kelas II Banjarmasin memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:



TUGAS BALMON BANJARMASIN

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendali di bidang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

FUNGSI BALMON BANJARMASIN

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

1. Subbagian Umum

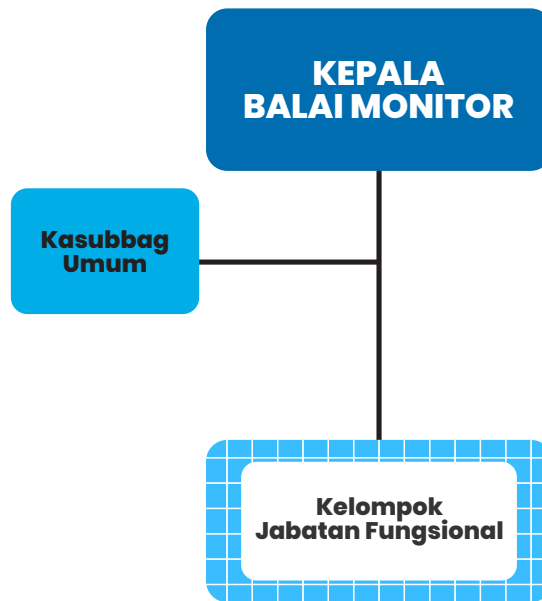
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- 1). Pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3). Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI



PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah pegawai yang tercatat di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berjumlah sebanyak 32 orang pegawai. Dimana dari 32 orang

pegawai tersebut terdiri atas 17 orang PNS, 12 Orang PPNNP, 1 orang Petugas Pelayanan Perizinan MOTS dan 2 Orang Outsourcing pengemudi dengan rentang usia pegawai yang terdata berusia dari 27 tahun s.d 56 tahun.

POTENSI KEPEGAWAIAN

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin

Jenis Kelamin

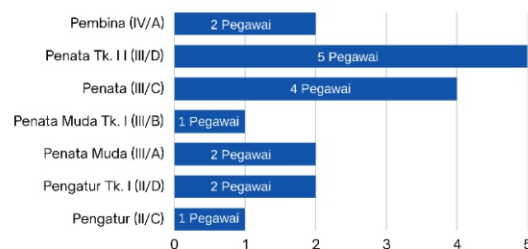


27 Pegawai

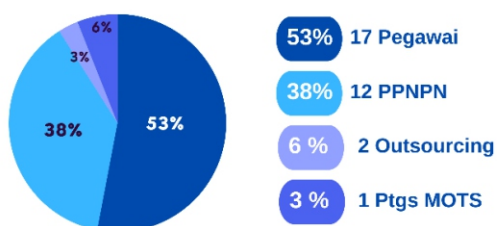


5 Pegawai

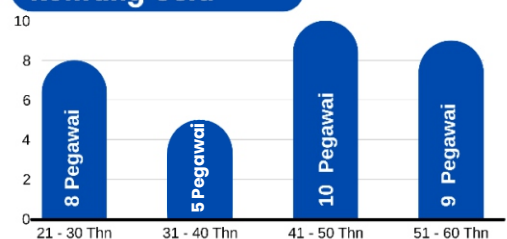
Pangkat/Gol. PNS



Status Kepegawaian



Rentang Usia



TABEL DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan
1	Edi Mulyono	197111291991031002	Pembina (IV/A)	KEPALA BALMON
2	Ahmad Sanusi	197203271992031004	Pembina (IV/A)	KEPALA SUBBAGIAN UMUM
3	Muhammad Amin	197305131993031001	Penata Tingkat I (III/D)	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
4	Muayyanah	198411232009012011	Penata Tingkat I (III/D)	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
5	Ramadhika Trisnasari	198506112008032001	Penata Tingkat I (III/D)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
6	Henrian Robby Fakhriannur	197909112008031002	Penata Tingkat I (III/D)	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
7	Miwan Eko Wicaksono	198810062008031001	Penata Tingkat I (III/D)	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
8	Guntur Siburian	197007271992031003	Penata (III/C)	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Penyelia
9	Adhi Kristanto	198306272006041002	Penata (III/C)	Analisis SDM SFR Level 2
10	Wahyu Pamungkas	198207242014031001	Penata (III/C)	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
11	Mardiana	198605202009122001	Penata (III/C)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
12	Nofiannoor	197911222008121002	Penata Muda TK. I (III/B)	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama
13	Bahransyah	196803082003121001	Penata Muda (III/A)	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana Lanjutan
14	Rudi Wahyudi	197908092007011002	Penata Muda (III/A)	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana Lanjutan
15	Heriansyah	197004212009121001	Pengatur Tingkat I (II/D)	Analisis SDM SFR Level 1
16	Dania Fauziah	199706112019022001	Pengatur Tingkat I (II/D)	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana
17	Gito Syahril Fajar	199804192022031007	Pengatur (II/C)	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana

Kendala dihadapi di bidang pembangunan SDM dalam hal ini adalah tidak adanya anggaran khusus pada satuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi bagi pegawai yang belum diakomodir oleh

pusat (Kementerian Kominfo) sehingga peningkatan kompetensi yang diharapkan dapat membentuk SDM unggul yang mampu menghasilkan berbagai inovasi belum dapat tercapai.

TABEL PPNPN, PETUGAS MOTS DAN OUTSORCING

No.	Nama	Keterangan
1	Samugi Pangastewomi	PPNPN
2	Maryadi	PPNPN
3	Syahrifannoor	PPNPN
4	Alwin Auliarachaman	PPNPN
5	Muhammad Rifani	PPNPN
6	Asmat	PPNPN
7	Herliadi	PPNPN
8	Arbani	PPNPN
9	Munib	PPNPN
10	M. Fitrianur	PPNPN
11	Muhammad Bakirurrahman	PPNPN
12	M. Dede yusuf	PPNPN
13	Dewi Anida	Petugas MOTS
14	Zain Thoha	Outsourcing (Pengemudi)
15	Rizaldi	Outsourcing (Pengemudi)

Penatausahaan kepegawaian yang dilaksanakan di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat diamati melalui tabel berikut ini.

No	Nama Kegiatan Kepegawaian	Bulan Kegiatan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	Kenaikan Pangkat	April	1 Orang	Kenaikan Pangkat Reguler
		Juni	2 Orang	Kenaikan Pangkat Reguler
		Oktober	2 Orang	Kenaikan Pangkat Reguler
2.	Kenaikan Gaji Berkala	Januari	2 Orang	-
		Februari	1 Orang	-
		Maret	5 Orang	-
		April	1 Orang	-
		Mei	1 Orang	-
3.	Mengundurkan Diri	Desember	1 Orang	PPNPN Satpam
4.	Pengembangan Kompetensi	Januari	1 Orang	PPK Negara Tersertifikasi
		Maret	2 Orang	PPK Tipe C
		April	1 Orang	PFR Ahli Muda
		Oktober	2 Orang	1. Analis SDMA Muda 2. PFR Terampil Pelaksana
5.	Pindah Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional Tertentu	November	2 Orang	1. Pelaksana ke Analis SDM Aparatur Ahli Muda 2. Pelaksana ke APK APBN
		Desember	1 Orang	1. Pelaksana ke PRF Terampil Pelaksana

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan, Indonesia. Secara geografis, provinsi ini berada pada koordinat 114°19'33" – 116°33'28" Bujur Timur dan 1°21'49" – 1°10'14" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 38.744,23 km², Kalimantan Selatan mencakup sekitar 6,98% dari total luas Pulau Kalimantan dan sekitar 1,96% dari total luas wilayah Indonesia. Wilayah ini juga kaya akan keanekaragaman hayati, terutama di kawasan dataran rendah yang merupakan habitat bagi berbagai spesies satwa air tawar dan hutan tropis di dataran tinggi. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 4,3 juta jiwa.

Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mencakup area strategis di Kalimantan Selatan dan sekitarnya, yang berpotensi menghadapi berbagai masalah dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Beberapa tantangan utama meliputi meningkatnya penggunaan perangkat komunikasi nirkabel yang tidak berizin, interferensi frekuensi akibat penggunaan ilegal atau tidak sesuai standar, serta potensi gangguan terhadap layanan publik seperti komunikasi penerbangan dan maritim.

Selain itu, perkembangan teknologi telekomunikasi, termasuk implementasi 5G dan *Internet of Things* (IoT), dapat menambah kompleksitas pengawasan spektrum. Faktor geografis, seperti wilayah pesisir dan perbatasan dengan provinsi lainnya, juga dapat memicu permasalahan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi lebih intensif. Oleh karena itu, penguatan sistem pemantauan, peningkatan penegakan regulasi, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin meliputi:

- 1). Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- 2). Perencanaan kinerja berisi ringkasan/khtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- 3). Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
- 4). Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

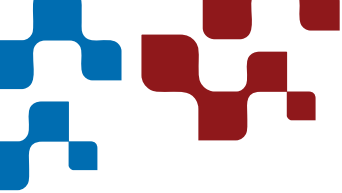
BAB II

PERJANJIAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS
- SASARAN KEGIATAN
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

02





A. RENCANA STRATEGIS

Salah satu arah Kebijakan Nasional RPJMN 2021-2024 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital.

3 (tiga) tujuan strategis Kementerian komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Perkembangan teknologi dan layanan akses broadband dan digital seperti teknologi 5G, *Internet of Things* (IoT), *big data*, *block chain*, *artificial intelligence*, penyiaran digital dan lain

sebagainya termasuk kebutuhan talent digital tentunya menjadi tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika termasuk didalamnya Ditjen SDPPI yang memiliki tugas dan fungsi mengoptimalkan terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi di industri serta mewujudkan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program-program pemerintah yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2021-2024, yang mempunyai peran dalam upaya optimalisasi pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga meningkatkan tertibnya para pengguna frekuensi serta kenyamanan berkomunikasi.



B. SASARAN KEGIATAN

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2020-2024 yang telah disusun yaitu :

- 1). Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.
- 2). Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki peran dalam mencapai

beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

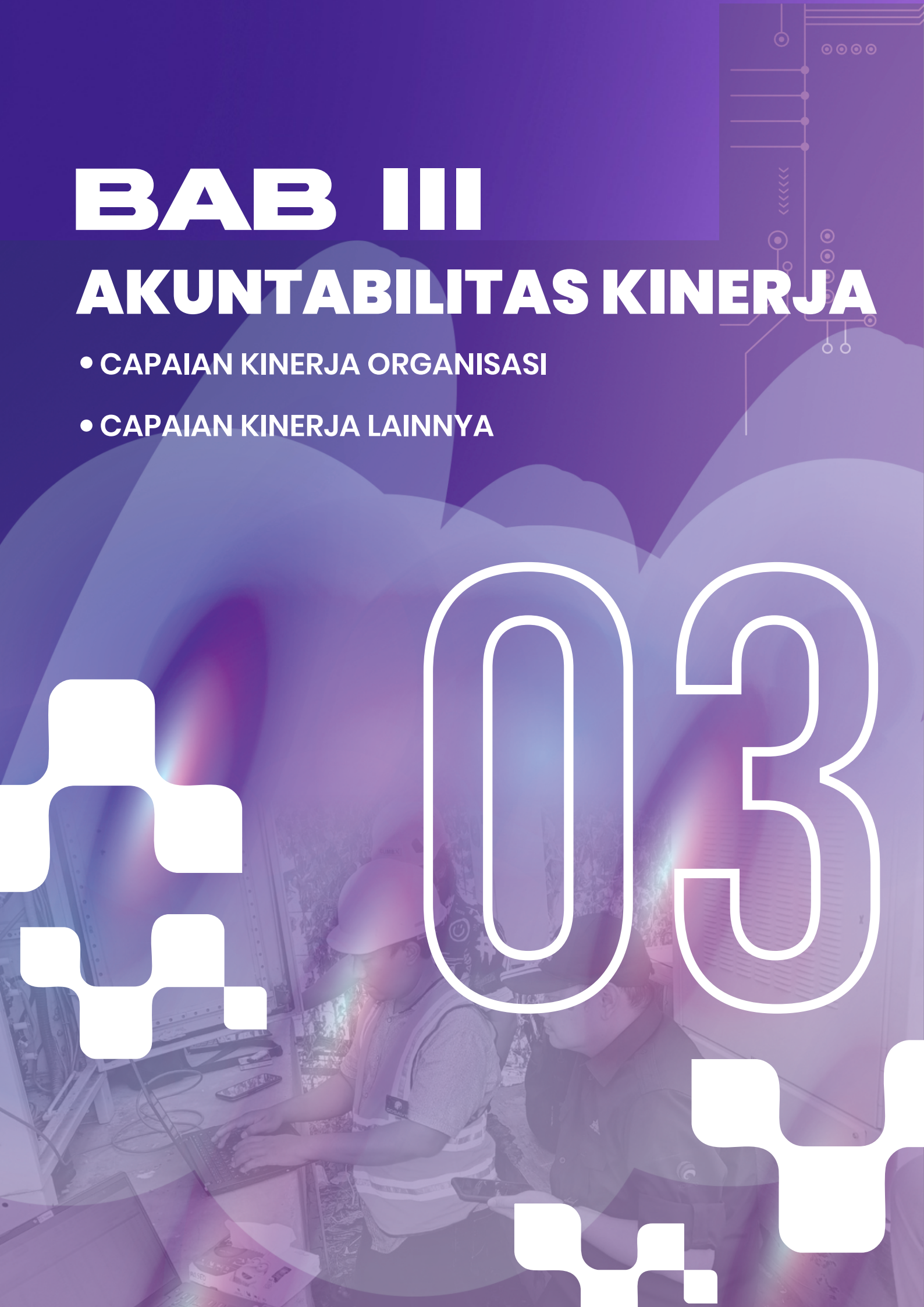
No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100 %
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio	100 %
		3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100 %
		4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%
		5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%
		6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100 %
		7. Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100 %
		8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100 %
		9. Bimbingan Teknis SRC/LRC	100 %
		10. ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100 %
		11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	12. Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,89
		13. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- CAPAIAN KINERJA LAINNYA

03



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIN 2024 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Secara lengkap capaian

kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum	100 %	100 %	100 %
		2. Frekuensi Radio di Kab/Kota			
		3. Pemeriksaan Stasiun Radio	100 %	117,50 %	117,50 %
		4. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100 %	100 %	100 %
		5. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100 %	107,53 %
		6. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100 %	105,26 %
		7. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100 %	134,17 %	134,17 %
		8. Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPNL	100 %	100 %	100 %
		9. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %
		10. Bimbingan Teknis SRC/LRC	100 %	145 %	145 %
		11. ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKLAN	100 %	142,50 %	142,50 %
		12. Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya tata kelola Birokrasi yang efektif dan efisien	13. Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,89	90,43	100,60 %
		14. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100	100	100 %



SASARAN

1

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban Serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio Dan Perangkat Telekomunikasi

1. IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota pada Tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin ditargetkan capaian sebesar 100%, dengan rincian target sebagai berikut:

- A. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota (Bobot: 70%) Persentase target yakni 100% Kabupaten/Kota Termonitor (13 kabupaten/kota), minimal 2 lokasi pemantauan dengan komponen perhitungannya antara lain:
- 15 pita frekuensi dilakukan observasi;
 - 50% ISR termonitor;
 - 70% hasil monitor harus teridentifikasi.

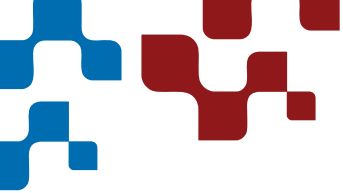
Adapun capaian indikator kinerja terkait persentase monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dalam jangka waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada uraian tabel di bawah yang dilanjutkan dengan penjelasan capaiannya

- B. Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya (Bobot: 30%) Target observasi dan identifikasi setiap hari kerja, minimal 60% dari total hari kerja setahun atau 14 kali setiap bulan untuk setiap stasiun transportable (2 stasiun *transportable*) masing-masing dilakukan observasi dan identifikasi terhadap 5 pita frekuensi marabahaya.

Indikator Kerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Presentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	2020	50%	100%	200%
	2021	80%	100%	125%
	2022	80%	100%	125%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Indikator kinerja persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

% Capaian = 70% Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota + 30% Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya



Dari rumusan tersebut, secara detail capaian perkomponen adalah sebagai berikut:

A. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota (Bobot: 70%)

Monitoring pita frekuensi radio di kabupaten/kota dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan

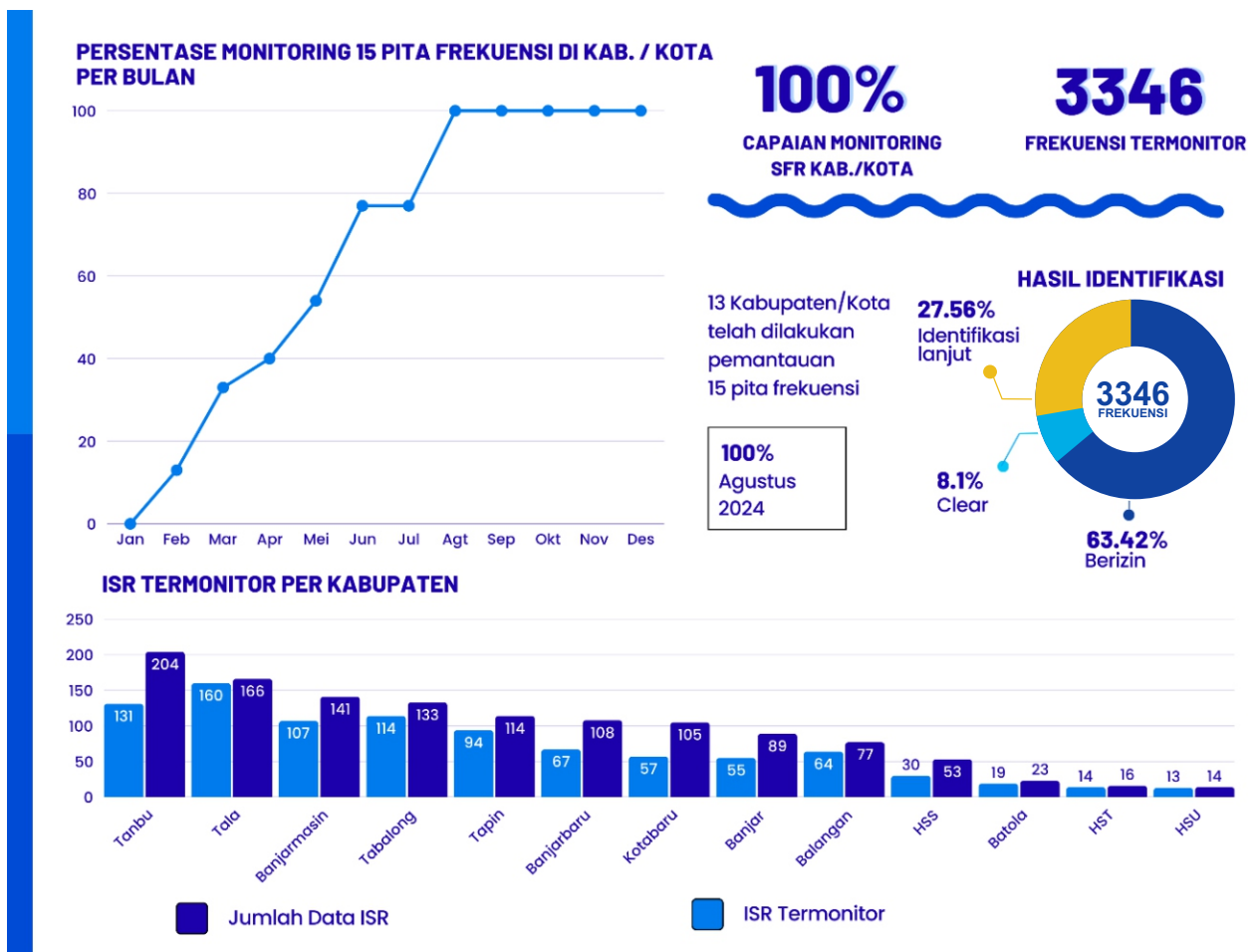
spektrum frekuensi radio dengan menggunakan stasiun transportable dan/atau stasiun jinjing/bergerak dan dilaporkan melalui aplikasi *Report on Line* (RoL). Pemantauan frekuensi radio dilakukan minimal pada 15 subservice/pita frekuensi. Rincian subservice/pita frekuensi tersebut dapat diamati sesuai data pada tabel berikut:

No.	Subservice	Pita Frekuensi
1.	Radio FM, DRM	87 – 108 MHz
2.	Penerbangan VHF	108 – 137 MHz
3.	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik, Maritim VHF	137– 174 MHz
4.	DRM, DAB	174– 230 MHz
5.	Tetap, Bergerak, Marabahaya	300– 430 MHz
6.	Komrad UHF	430-460 MHz
7.	Tetap Bergerak	460– 470 MHz
8.	Televisi UHF	478 – 806 MHz
9.	Trunking, Downlink Seluler 800	806 – 880 MHz
10.	Downlink Seluler 900	925 – 960 MHz
11.	International Mobile Telecommunication (IMT)	1427 – 1518 MHz
12.	Downlink Seluler 1800	1805 – 1880 MHz
13.	Downlink Seluler 2100	2110 – 2170 MHz
14.	International Mobile Telecommunication (IMT)	2170 – 2200 MHz
15.	Seluler, Broadband 2.3 Ghz	2300 – 2400 MHz



Capaian target monitoring pita frekuensi radio di kabupaten/kota berhasil mengidentifikasi frekuensi sebanyak 3346. Proses monitoring 15 pita frekuensi tersebut dimulai sejak bulan Januari. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah ISR terbanyak yang berhasil dimonitor terdapat di Kab. Tanah Bumbu serta Kab. Tanah Laut. Sementara untuk jumlah ISR paling sedikit terdapat di Kab. Hulu Sungai Utara dan Kab. Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan hasil monitoring dari seluruh frekuensi yang berhasil dimonitor, diketahui sebanyak 63,42% telah berizin. Sementara sebagian lainnya masih memerlukan identifikasi lanjutan, dan beberapa sudah dinyatakan status clear. Adapun untuk rincian persentase monitoring dengan komponen-komponen perhitungannya dapat dilihat pada uraian data melalui gambar berikut:



Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya Bobot: (30%)

Monitoring rutin pita frekuensi marabahaya dilaksanakan melalui kegiatan monitoring rutin di kantor dengan menggunakan stasiun transportable pada setiap hari kerja terhadap

5 (lima) pita frekuensi marabahaya setiap bulannya dan dilaporkan melalui aplikasi *Report on Line* (RoL).

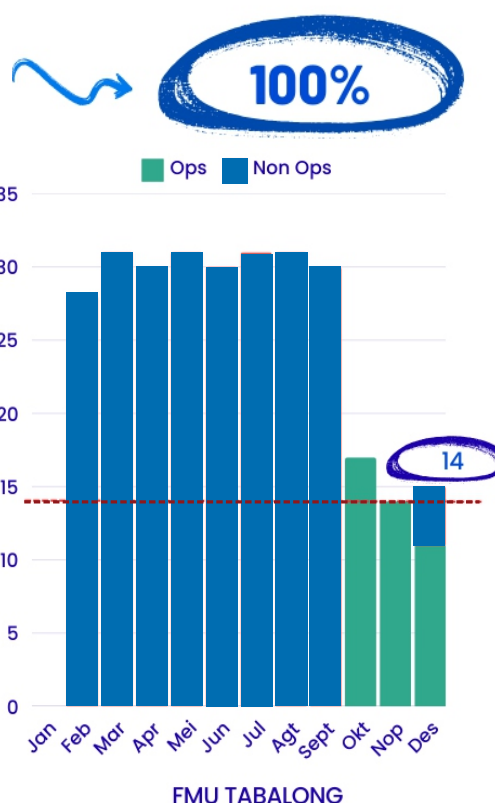
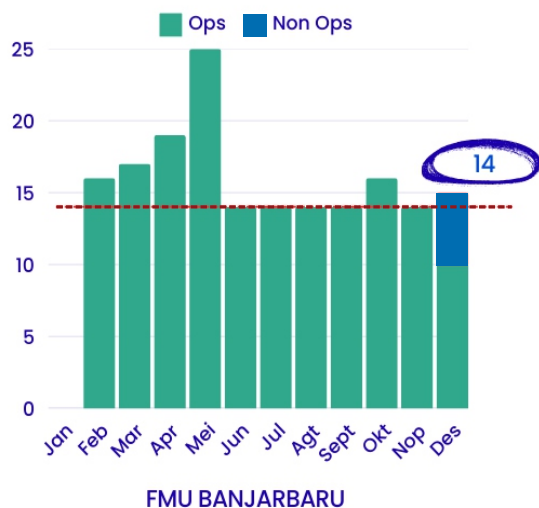
Adapun 5 (lima) pita frekuensi marabahaya yang dipantau adalah sesuai tabel berikut:

No.	Subservice	Pita Frekuensi
1.	Radio Navigasi Penerbangan	108 – 117,975 MHz
2.	Bergerak Penerbangan	117,975 – 137 MHz
3.	Bergerak Maritim (Panggilan & DSC Marabahaya)	156,4875 – 156,8125 MHz
4.	Tetap, Bergerak	235 – 267 MHz
5.	Satelit Bergerak (Bumi ke Angkasa)	406 – 406,1 MHz

Capaian monitoring rutin pita frekuensi marabahaya bergantung dari kondisi perangkat stasiun *transportable*. Sementara untuk kondisi non operasional, harus dilaporkan berupa nota dinas dari Kepala Balai ke Direktur Pengendalian. Nota dinas tersebut yang kemudian diupload ke aplikasi *Report on Line* (RoL) sebagai syarat untuk mengubah status perangkat dari kondisi

Operasional menjadi Non Operasional agar tidak mempengaruhi perhitungan capaian target monitoring rutin pita frekuensi marabahaya. Adapun rincian capaian monitoring rutin pita frekuensi marabahaya serta status kondisi perangkat *transportable* FMU Banjarbaru dan FMU Tabalong selama Tahun 2024 dapat diamati melalui uraian grafik berikut:

CAPAIAN MONITORING RUTIN PITA FREKUENSI MARABAHAYA



Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Di Kabupaten/Kota" yang persentase capaiannya dihitung dari akumulasi capaian Monitoring Pita Frekuensi Radio di

Kabupaten/Kota dan capaian Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya yang masing-masing capaiannya ditargetkan 100%, secara akumulasi sampai dengan Desember 2024 telah tercapai 100% sesuai target yang ditetapkan.

Dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Di Kabupaten/Kota" tidak ditemui kendala yang berarti karena terdapat faktor-faktor pendukung diantaranya:

- Petugas PIC aplikasi pelaporan yang bertanggung jawab dan disiplin dalam melaporkan setiap hasil kegiatan;
- Komunikasi yang baik antara PIC aplikasi pelaporan di Balmon dengan PIC aplikasi pelaporan yang ada di Kantor Pusat;
- Perangkat SMFR dengan nilai SLA yang baik, serta jaringan internet yang andal

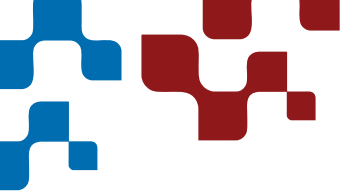
Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dapat dilihat dari beberapa aspek yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik antara lain:

- Dengan **Berorientasi** memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna frekuensi radio;
- Menggunakan prinsip yang **Akuntabel**, dan para pegawai yang ber**Kompeten**, mendorong untuk bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan monitoring, memastikan bahwa setiap penggunaan frekuensi sesuai dengan regulasi yang ada dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.
- Dengan menerapkan sikap **Harmonis** dan **Loyal**, kegiatan ini dapat membangun hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengawasan dan pengelolaan spektrum frekuensi radio.
- Nilai **Adaptif** memungkinkan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi masyarakat yang terus berubah, sehingga monitoring dapat dilakukan secara efektif.
- **Kolaborasi** antara berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan lokal dan komunitas pengguna frekuensi, menciptakan sinergi yang kuat dalam menjaga penggunaan spektrum radio yang tertib.
- Secara keseluruhan, penerapan budaya BerAKHLAK dalam kegiatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kegiatan monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI KAB/KOTA

Kegiatan pengelolaan data monitoring spektrum frekuensi radio secara nasional dibutuhkan untuk memperoleh data hasil monitoring spektrum frekuensi radio dengan cara melakukan perencanaan, analisis, dan evaluasi hasil monitoring yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI dalam hal ini Direktorat Pengendalian SDPPI. Data yang diperoleh dari hasil monitoring merupakan data mentah yang perlu dianalisis dan diolah lebih lanjut guna mendapatkan informasi yang berkualitas. Informasi tersebut bisa digunakan untuk banyak hal antara lain sebagai dasar perencanaan monitoring selanjutnya, membuat profil pengguna dan penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia.



KEGIATAN PEMANTAUAN PENGGUNA SFR DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN



2. IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Pada perjanjian kinerja tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin ditargetkan melakukan pemeriksaan stasiun radio dengan target sebesar 100%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- A. Target Pemeriksaan Stasiun Radio, terdiri dari:
1. Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link
 - a. *Remote Site* sejumlah 1607 stasiun diperiksa (100%);
 - b. *Open Shelter* sejumlah 434 stasiun diperiksa (100%).
 2. Pengukuran Parameter Teknis dan

3. Karakteristik Pemancaran Stasiun Siaran
 - a. Radio Siaran FM sebanyak 81 Stasiun (100%)
 - b. Televisi Siaran Digital sebanyak 15 Stasiun (100%)
4. Monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi Ditargetkan sejumlah 8 kali kegiatan monitoring alat perangkat telekomunikasi (100%).

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio di Wilayah Kerja	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	100%	128%	128%
	2023	100%	121,91%	121,91%
	2024	100%	100%	100%

Indikator kinerja persentase pemeriksaan stasiun radio secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = 80\% \text{ Pemeriksaan Stasiun Radio} + 20\% \text{ Monitoring Perangkat}$$



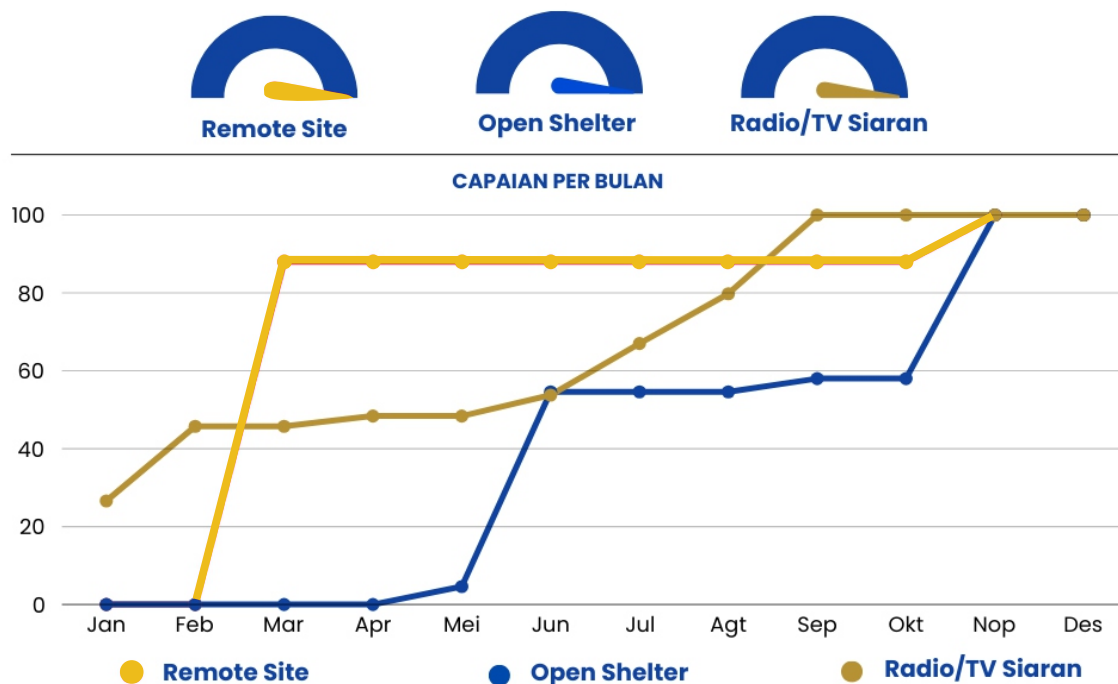
Dari rumusan tersebut, secara detail capaian per komponen perhitungan adalah sebagai berikut:

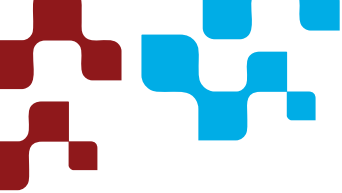
- A. Pemeriksaan Stasiun Radio (Bobot: 80%)Pemeriksaan stasiun radio dicapai dari akumulasi capaian kegiatan pemeriksaan

stasiun MW link secara remote site, pemeriksaan stasiun MW link secara open shelter, serta kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun Radio Siaran FM dan TV Siaran Digital. Adapun capaian keseluruhan kegiatan dapat dilihat pada grafik berikut:

CAPAIAN PEMERIKSAAN STASIUN RADIO TAHUN 2024

Untuk seluruh target pemeriksaan stasiun radio telah dicapai sebesar 100%.





Untuk penjelasan dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

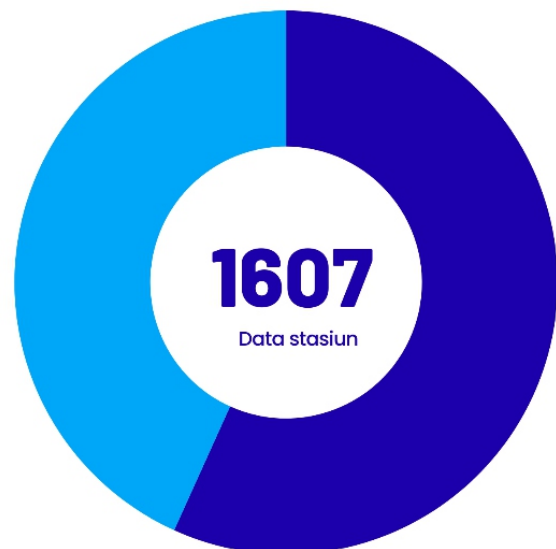
1. Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link (*Remote Site*) Pemeriksaan stasiun radio MW Link secara remote site telah dilakukan pemeriksaan terhadap

1607 stasiun sesuai jumlah target pada aplikasi APSTARD, sehingga nilai capaian adalah sebesar 100% dengan rincian data hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN STASIUN MW LINK

- **SESUAI**
Data stasiun MW Link di lapangan telah sesuai dengan database SIMS
- **TIDAK AKTIF**
Stasiun MW Link tidak digunakan atau tidak aktif (*off air*)
- **TIDAK SESUAI**
Stasiun MW Link tidak dilapangan tidak sesuai dengan database SIMS

REMOTE SITE



0% 43.2% 56.8%



Adapun data keseluruhan pemeriksaan stasiun radio microwave link secara Remote Site berdasarkan target dari aplikasi APSTARD maupun non APSTARD. Berdasarkan data yang diperoleh ditemukan total sebanyak 2477 dengan status sesuai dengan ISR, kemudian sebanyak

1631 berstatus tidak aktif, kemudian sebanyak 34 tidak berizin, dan sebanyak 3 yang tidak sesuai dengan Partek. Rincian data terkait pemeriksaan tersebut dapat amati melalui uraian tabel berikut:

Operator Seluler	Sesuai ISR	Tidak Aktif	Tidak Berizin	Tidak Sesuai Praktek	Total
PT. Indosat, Tbk.	855	801	15	3	1674
PT. Smart Telecom	390	30	-	-	420
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	497	305	12	-	814
PT. Telekomunikasi Seluler	425	311	-	-	736
PT. XL Axiata, Tbk.	310	184	7	-	501
Total	2477	1631	34	3	4146

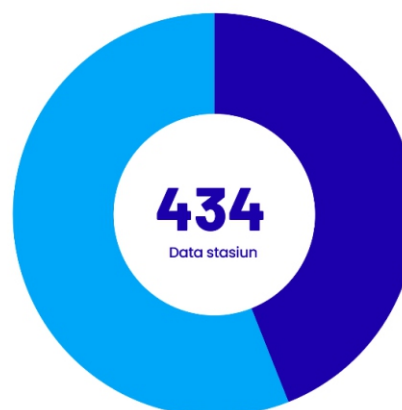
2. Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link (*Open Shelter*) Pemeriksaan stasiun radio MW Link secara *open shelter* telah dilakukan pemeriksaan terhadap 434 stasiun sesuai jumlah target pada

aplikasi APSTARD, sehingga nilai capaian adalah sebesar 100% dengan rincian data hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN STASIUN MW LINK

- **SESUAI**
Data stasiun MW Link di lapangan telah sesuai dengan database SIMS
- **TIDAK AKTIF**
Stasiun MW Link tidak digunakan atau tidak aktif (*off air*)
- **TIDAK SESUAI**
Stasiun MW Link tidak dilapangan tidak sesuai dengan database SIMS

OPEN SHELTER



0% 43.2% 56.8%

Adapun data keseluruhan pemeriksaan stasiun radio microwave link secara Open Shelter berdasarkan target dari aplikasi APSTARD maupun non APSTARD diketahui total sebanyak 234 dengan status sesuai ISR, kemudian

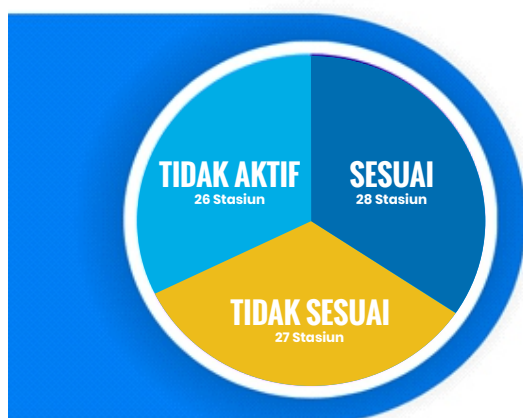
sebanyak 335 dengan status tidak aktif, dan sebanyak 2 dengan status tidak berizin. Adapun rincian data tersebut dapat diamati melalui uraian tabel berikut:

Operator Seluler	Sesuai ISR	Tidak Aktif	Tidak Berizin	Tidak Sesuai Praktek	Total
PT. Indosat, Tbk.	82	141	-	-	223
PT. Smart Telecom	38	15	-	-	53
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	46	76	-	-	122
PT. Telekomunikasi Seluler	26	66	-	-	92
PT. XL Axiata, Tbk.	42	37	2	-	81
Total	234	335	2	0	571

- Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran telah dilakukan terhadap 81 stasiun siaran radio FM sesuai dengan jumlah stasiun siaran yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga dapat memperoleh capaian sebesar 100%. Sementara itu untuk pengukuran stasiun televisi siaran digital telah dilakukan pengukuran terhadap sebanyak 15 stasiun sesuai jumlah stasiun penyelenggara MUX yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga dapat memperoleh capaian target sebesar 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun radio siaran FM, diperoleh data bahwa dari total 81 stasiun terdapat stasiun dengan status yang sesuai dengan ISR, tidak sesuai dengan ISR dan sudah tidak aktif (*off air*). Adapun untuk rincian capaian hasil pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar radio siaran FM tersebut dapat diamati melalui grafik berikut.

PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS DAN KARAKTERISTIK PEMANCAR STASIUN RADIO SIARAN FM (TOTAL : 81 STASIUN)

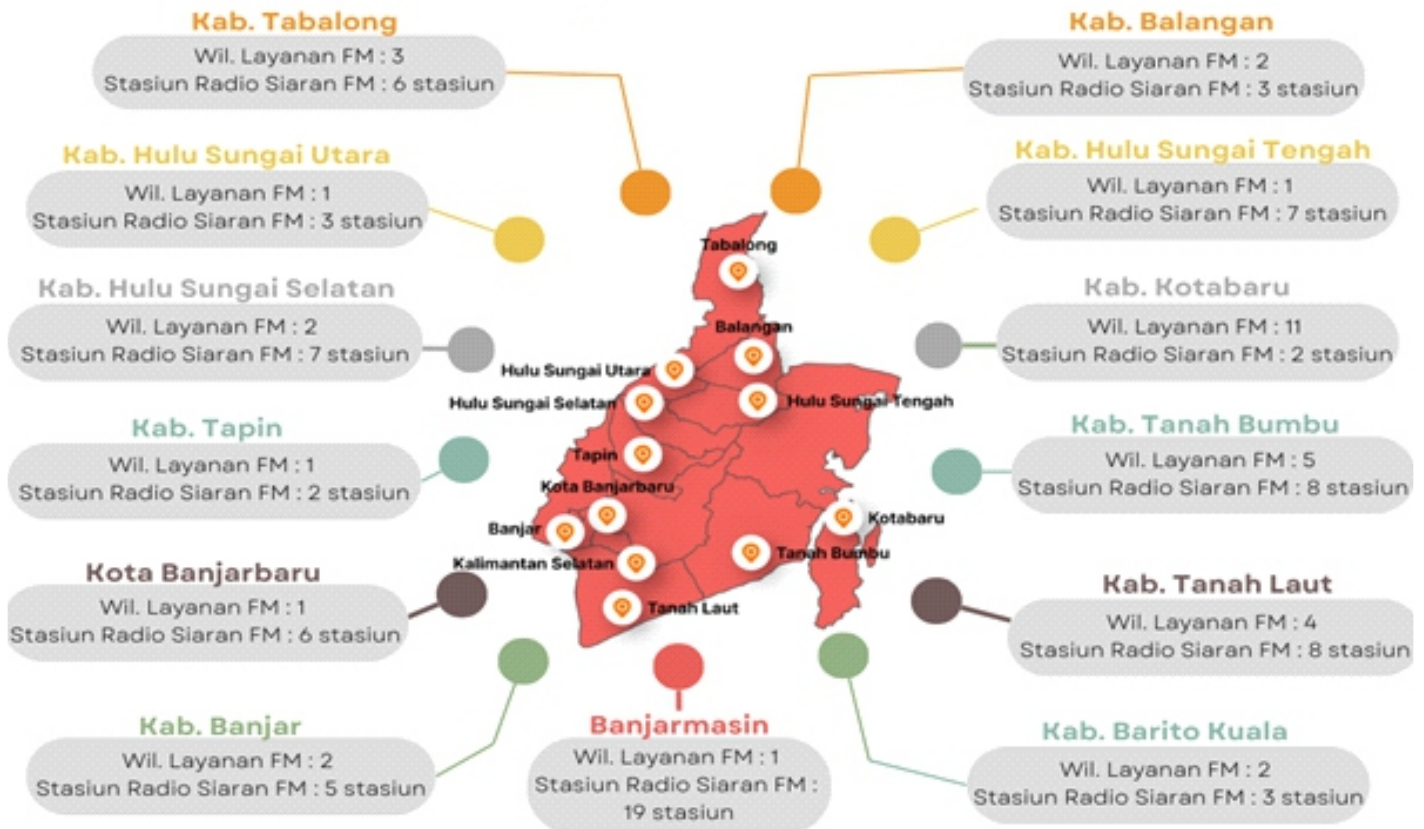


- Sesuai**
Parameter teknis dan karakteristik pemancar sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan/atau ketentuan teknis yang tertuang dalam PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2023.
- Tidak sesuai**
Parameter teknis dan karakteristik pemancar tidak sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan/atau ketentuan teknis yang tertuang dalam PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2023.
- Tidak aktif**
Stasiun pemancar tidak mengudara (*off air*)

PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial

ADAPUN DATA JUMLAH STASIUN RADIO SIARAN FM BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAPAT DILIHAT MELALUI PEMETAAN PADA GAMBAR BERIKUT :

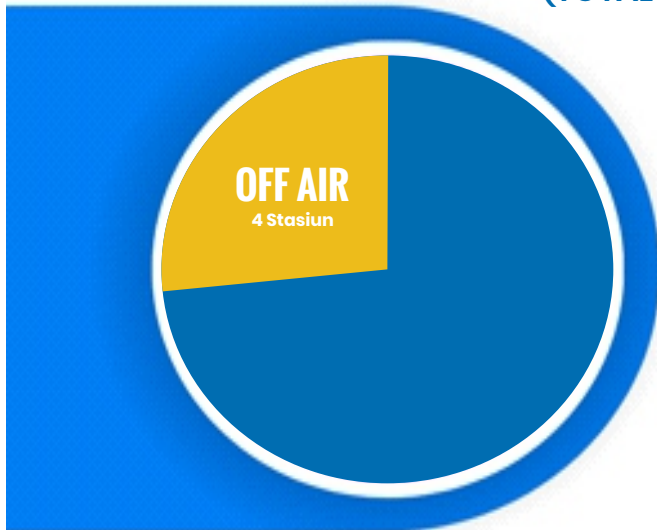
DATA JUMLAH STASIUN RADIO FM DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN



Sementara itu untuk hasil pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar televisi siaran digital, diperoleh data bahwa dari total 15 stasiun terdapat stasiun yang masih berstatus *on air* dan *off air*.

Adapun rincian capaian hasil pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar televisi siaran digital, dapat dilihat pada uraian grafik berikut.

PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS DAN KARAKTERISTIK PEMANCAR STASIUN TV SIARAN DIGITAL TERESTERIAL (TOTAL : 15 STASIUN)



● **ON AIR (Sesuai)**

Stasiun pemancar kondisi *on air*, parameter teknis dan karakteristik pemancar sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan/atau ketentuan teknis yang tertuang dalam PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2019.

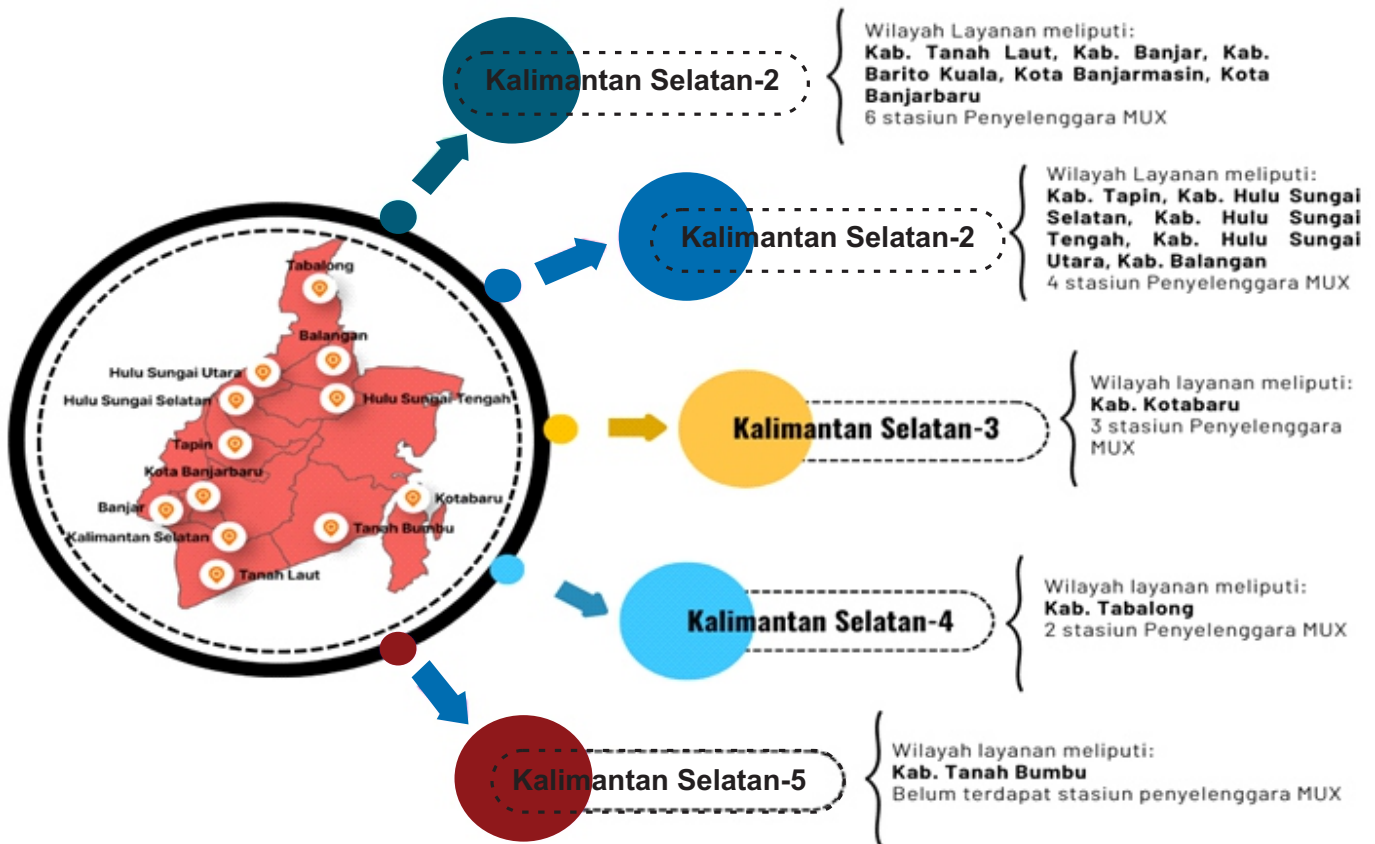
● **OFF AIR**

Stasiun pemancar tidak mengudara (*off air*)

PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency*



**UNTUK WILAYAH LAYANAN DAN JUMLAH STASIUN PENYELENGGARA MUX
YANG TERDAPAT DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN, DAPAT DI
AMATI MELALUI PEMETAAN PADA GAMBAR**



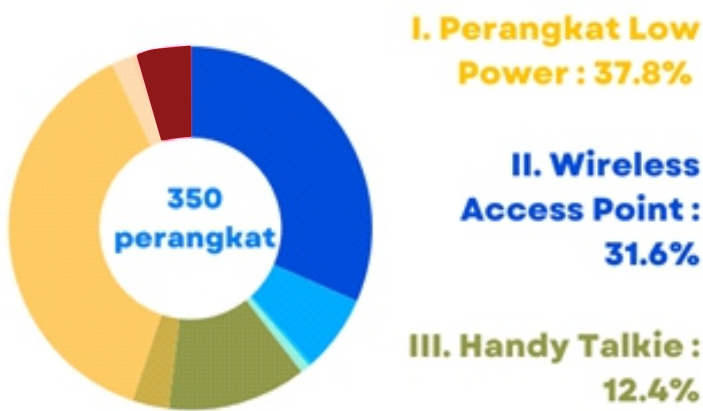
- B. Monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi (Bobot: 20%) Untuk memenuhi nilai akumulasi capaian untuk indikator Pemeriksaan Stasiun Radio sebesar 100 %, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melaksanakan kegiatan monitoring sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi sebanyak 15 kegiatan melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 8 kegiatan. Adapun kegiatan ini sudah dapat memenuhi target yang ingin dicapai pada bulan Agustus.

Monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap jenis perangkat dengan prioritas yang ditetapkan pada target. Kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Pedoman Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi. Adapun rincian jumlah perangkat yang telah diperiksa berdasarkan 16 jenis perangkat prioritas dapat dilihat pada uraian data berikut.

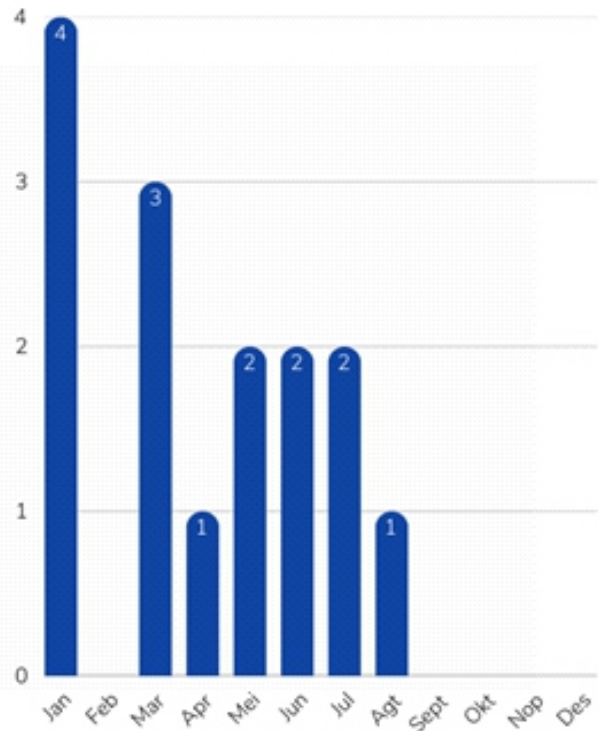
CAPAIAN MONITORING PERANGKAT TAHUN 2024



Persentase jenis perangkat yang paling banyak diperiksa dari 16 Perangkat Prioritas



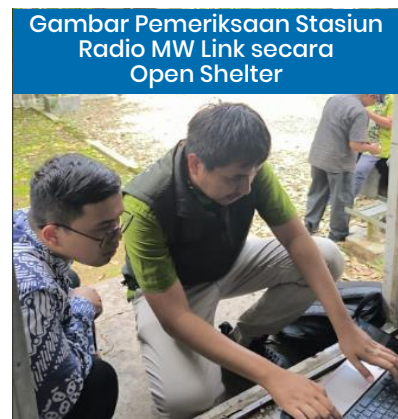
Total Kegiatan : 15 kegiatan



Berdasarkan uraian data diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio" yang persentase capaiannya dihitung dari akumulasi capaian Pemeriksaan Stasiun Radio dan capaian Monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi yang masing-masing capaiannya ditargetkan 100%, secara akumulasi sampai dengan Desember 2024 telah tercapai 100% sesuai target yang ditetapkan.

Adapun kendala yang dihadapi Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio" antara lain:

1. Banyaknya data yang harus diperiksa dan perlunya keterlibatan pihak eksternal dalam hal ini operator seluler untuk pemeriksaan stasiun microwavelink sehingga memerlukan strategi khusus agar dapat memenuhi capaian target 100%;
2. Data target pengukuran parameter teknis pemancar stasiun radio dan TV siaran digital yang berubah-ubah sesuai update database SIMS pada aplikasi APSTARD menyebabkan nilai capaian pun berubah-ubah sehingga membutuhkan kontrol yang baik terhadap nilai capaian agar dapat memenuhi capaian target 100%.



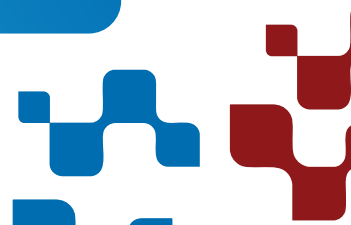
Implementasi Budaya BerAKHLAK

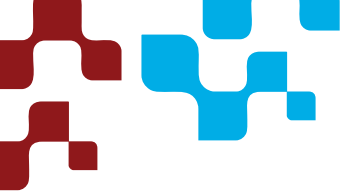
Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan spektrum frekuensi. Dengan nilai BerAKHLAK mendorong para pegawai untuk bertindak dengan integritas dan etika tinggi selama melaksanakan tugasnya, memastikan bahwa semua stasiun radio beroperasi sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang telah ditetapkan. Prinsip Akuntabel memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang

yang diambil selama pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Selain itu, sikap Harmonis dalam berinteraksi dengan pemilik stasiun radio menciptakan suasana yang kondusif melalui dialog dan kolaborasi, sehingga apabila terdapat masalah diselesaikan secara efektif.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PEMERIKSAAN STASIUN RADIO

Kegiatan pengelolaan data pemeriksaan stasiun radio secara nasional dibutuhkan untuk memperoleh data hasil pemeriksaan stasiun radio dengan cara melakukan perencanaan, analisis, dan evaluasi hasil pemeriksaan stasiun yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI dalam hal ini Direktorat Pengendalian SDPPI. Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan merupakan data mentah yang perlu dianalisis dan diolah lebih lanjut guna mendapatkan informasi yang berkualitas. Informasi tersebut bisa digunakan untuk banyak hal antara lain sebagai dasar perencanaan pemeriksaan selanjutnya, membuat profil pengguna dan penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia.





3. IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

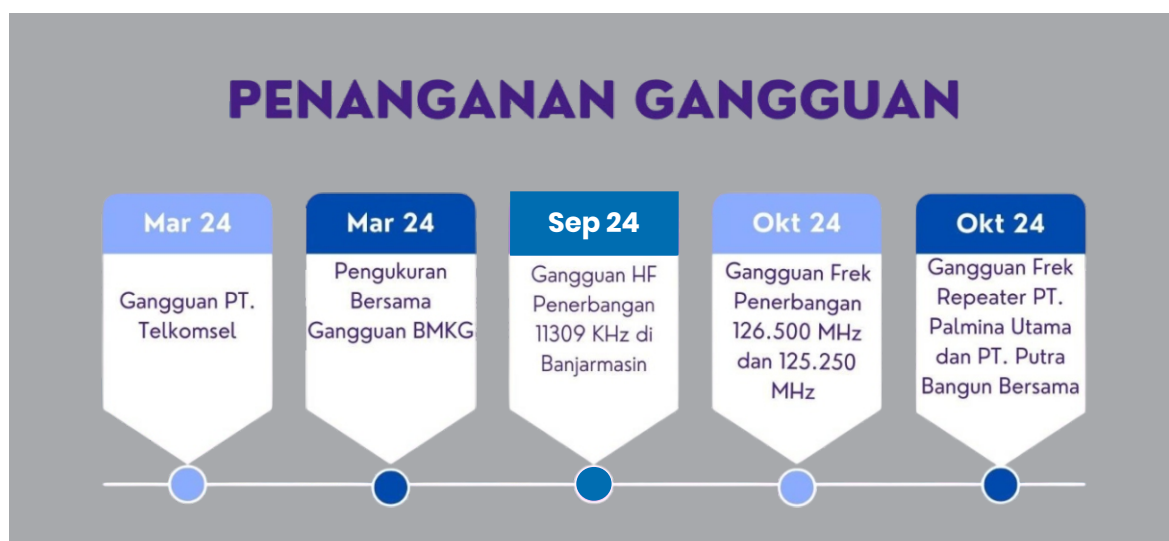
Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, penanganan gangguan spektrum frekuensi radio oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin ditargetkan untuk dapat menyelesaikan 100% aduan gangguan yang masuk. Berdasarkan pada data yang diperoleh tahun 2024, terdapat sejumlah 5 obyek aduan gangguan dari 5 surat pengaduan spektrum frekuensi radio. Aduan tersebut selanjutnya telah ditindaklanjuti seluruhnya sampai dengan selesai. Dengan demikian

Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada IK-3 dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %. Tabel berikut merupakan perbandingan target kinerja, realisasi kinerja, dan capaian kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin periode 2020 s/d 2024.

Indikator Kerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Presentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	2020	100%	100%	100%
	2021	97%	100%	103.09%
	2022	98%	100%	102.04%
	2023	99%	100%	101.01%
	2024	100%	100%	100%

Seperti dapat dilihat pada uraian tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penangan gangguan spektrum frekuensi radio sejak 2020-2024 dapat terlaksana dengan baik dan selalu dapat mencapai target bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Meskipun semua aduan gangguan frekuensi radio yang masuk dapat tertangani dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaan penanganan gangguan terdapat kendala

di lapangan yaitu gangguan yang sering terjadi tidak *continue/intermitten*, sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan kegiatan penanganan gangguan tersebut. Adapun untuk rincian serta urutan pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi tersebut dapat diamati pada gambar dibawah ini.



Berdasarkan data yang diperoleh, selama tahun 2024 terdapat 5 aduan terkait gangguan spektrum frekuensi radio. Adapun aduan tersebut di dapat pada bulan maret sejumlah 2 (dua) aduan yang di dapat dari PT. Telkomsel dan BMKG. Selanjutnya, pada bulan september terdapat aduan gangguan HF Penerbangan 11309 KHz di Banjarmasin. Kemudian, pada bulan oktober terdapat 2 (dua) gangguan pada Frekuensi Penerbangan 126.500

MHz dan 125.250 MHz di Banjarbaru, serta gangguan pada Frekuensi repeater PT. Pamina Utama dan PT. Putra Bangun Bersama di Kab. Banjar dan Kab. Barito Kuala. Adapun untuk beberapa dokumentasi penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tersebut dapat diamati pada gambar-gambar berikut.

Penanganan Gangguan terhadap PT. Telkomsel



Penanganan Gangguan terhadap PT. Telkomsel



Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio mencakup berbagai nilai yang mendukung efektivitas dan kualitas layanan. Berorientasi Pelayanan diwujudkan dengan memberikan respons cepat terhadap laporan gangguan Spektrum Frekuensi Radio, memastikan masyarakat mendapatkan solusi yang tepat waktu. Akuntabel diterapkan melalui pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan terkait proses identifikasi dan penyelesaian gangguan Spektrum Frekuensi Radio.

Nilai Harmonis terlihat dalam pendekatan persuasif dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah secara damai. Loyalitas ditunjukkan oleh

pegawai yang bertugas dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum sesuai regulasi. Adaptif tercermin dalam kemampuan pegawai menyesuaikan metode kerja dengan perkembangan teknologi dan jenis gangguan yang dihadapi. Terakhir, Kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan telekomunikasi dan penegakan hukum, untuk mengatasi gangguan Spektrum Frekuensi Radio secara efektif.

Dengan penerapan nilai-nilai ini, kegiatan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio tidak hanya menjaga kualitas komunikasi tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Adanya kegiatan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio ini dimaksudkan agar tertib dalam penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya, adapun tujuannya adalah untuk mengurangi potensi terjadinya gangguan Spektrum Frekuensi Radio di seluruh dinas frekuensi. Dan melalui upaya yang telah dilakukan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang optimal tanpa hambatan.



4. IK 4 Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi ditargetkan untuk dapat menertibkan seluruh pengguna frekuensi illegal untuk dihentikan pancarannya. Kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan pada tahun 2024, termasuk di dalamnya kegiatan Penertiban Nasional sebanyak 4 (empat) kegiatan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat menertibkan seluruh pengguna frekuensi illegal yang berjumlah 60 frekuensi, kemudian untuk penertiban

alat/perangkat telekomunikasi yang ditertibkan berjumlah 7 APT tidak bersertifikat yang menjadi target.

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi IK-4 terkait penertiban spektrum frekuensi radio serta alat dan/atau perangkat Telekomunikasi tahun 2024 telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 93 % dengan persentase capaian 107,53 %. Tabel berikut merupakan perbandingan target kinerja, realisasi kinerja, dan capaian kinerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin periode 2020 sd 2024.

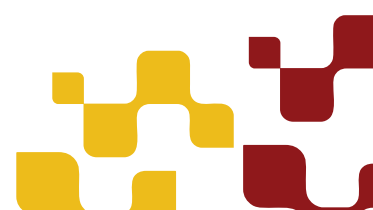
Indikator Kerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Presentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	2020	50%	62.60%	125.2%
	2021	70%	100%	142.86%
	2022	90%	100%	111.111%
	2023	93%	100%	107.53%
	2024	93%	100%	107.53%

Indikator Kinerja persentase Penertiban secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = 60\% \text{ Penertiban SFR} + 40\% \text{ Penertiban Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi}$$

Seperti data yang diuraikan pada tabel diatas, dapat dilihat persentase indikator kinerja penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dari tahun ke tahun selalu menunjukkan hasil yang sangat baik. Dimana terlihat dari data tersebut, penertiban yang dilakukan telah mampu memenuhi target yang ingin dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Guna mempertahankan

capaian kinerja yang diperoleh, tetap perlu dilakukan adanya kegiatan pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio khususnya pengenaan sanksi administratif terhadap masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Gambar berikut ini merupakan urutan pelaksanaan penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada Tahun 2024.



PENERTIBAN SFR & APT

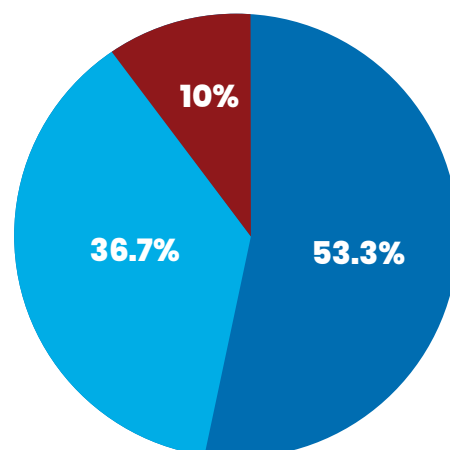


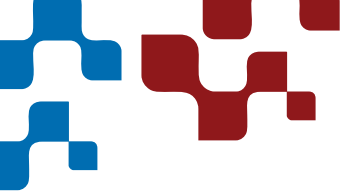
Semua Frekuensi Ilegal di off air-kan dan APT tidak bersertifikat dikenakan sanksi administrasi

Sesuai dengan data yang diuraikan pada gambar diatas, penertiban dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2024. Kegiatan penertiban pertama dilaksanakan pada bulan Mei 2024, di mana kegiatan ini merupakan penertiban nasional I (Tibnas I) dinas tetap MW Link Kab. Tabalong dan Kab. Hulu Sungai Utara, dengan jumlah temuan sebanyak 2 frekuensi ilegal. Selanjutnya, pada bulan Juli 2024 dilaksanakan penertiban reguler Dinas bergerak darat Kab. Tapin yang menemukan frekuensi ilegal sejumlah 11 frekuensi. Pada bulan September 2024, dilaksanakan penertiban nasional (Tibnas II) dinas tetap MW Link Kab. Banjar, Kab. Tanah Bumbu, dan Kab. Kotabaru dengan temuan frekuensi ilegal sejumlah 20 frekuensi. Kemudian, pada bulan oktober 2024 dilaksanakan

kegiatan penertiban nasional III (Tibnas III) Dinas tetap WLAN 2.4 GHz dan 5.8 GHz Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dimana ditemukan sejumlah 6 frekuensi ilegal. Selanjutnya yaitu pada bulan November 2024 dilaksanakan kegiatan penertiban nasional IV (Tibnas IV) APT dan Dinas bergerak darat Kota Banjarmasin dan Kab. Tanah Laut, di mana ditemukan sejumlah 21 frekuensi ilegal serta 7 APT tidak bersertifikat. Dari serangkaian kegiatan penertiban tersebut diperoleh total sebanyak 60 frekuensi ilegal yang selanjutnya di *off-air* kan pancarannya, serta 7 APT yang tidak bersertifikat telah dikenakan sanksi administratif.

DINAS DENGAN FREKUENSI ILEGAL





Berdasarkan hasil kegiatan penertiban yang dilakukan, didapatkan temuan bahwa Dinas Bergerak Darat merupakan dinas yang paling banyak mendapatkan temuan frekuensi illegal yaitu sejumlah 32 (53.3%), sementara itu Dinas Tetap MW Link sebanyak 22 (36,7%), serta Dinas Tetap WLAN sebanyak 6 (10%). Hasil penertiban selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembukaan segel

bagi pengguna yang telah memiliki Izin Siaran Radio (ISR) maupun bagi pengguna Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah mendapatkan sertifikat. Adapun beberapa dokumentasi penertiban spektrum frekuensi radio dapat dilihat pada gambar-gambar dibawah ini.



Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dinas Tetap MW Link

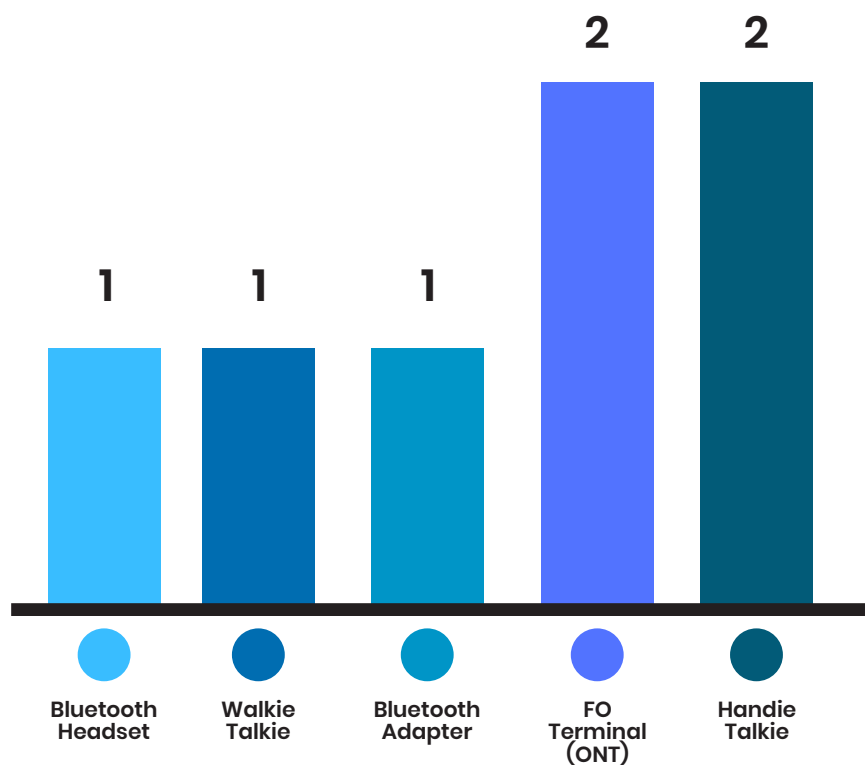


Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dinas Tetap WLAN

Berdasarkan hasil kegiatan penertiban, juga diperoleh 7 APT tidak bersertifikat. Adapun 7 APT tidak bersertifikat tersebut terdiri atas *bluetooth headset*, *FO Terminal (ONT)*, *walkie talkie*, *handie talkie*, serta *Bluetooth adapter*. Adapun untuk rincian masing-masing jumlah dari APT

yang ditertibkan dapat diamati pada grafik dibawah ini. Selanjutnya, APT tidak bersertifikat tersebut ditindaklanjuti dengan diserahkan ke Negara untuk selanjutnya dimusnahkan.

APT TIDAK BERSERTIFIKAT



Kegiatan Pemusnahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan di Kantor Balmon Kelas II Banjarmasin sebanyak 1 kali pada tahun 2024 untuk pemusnahan perangkat yang tidak ditindaklanjuti oleh pengguna hasil penertiban tahun 2023-2024 dan jumlah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat

Telekomunikasi yang dimusnahkan sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan rincian pada tabel di bawah ini. Sedangkan untuk dokumentasi kegiatan pemusnahan alat dapat diamati pada gambar selanjutnya.

Nama Perangkat	Jumlah
Exciter	4
HT	2
Walkie Talkie	4

PEMUSNAHAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HASIL PENERTIBAN DI BALMON KELAS II BANJARMASIN DILAKUKAN DENGAN CARA DIBAKAR



Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya **BerAKHLAK** dalam kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks ini, nilai **Berorientasi Pelayanan** terlihat dari upaya pegawai yang bertugas untuk memberikan informasi dan bantuan kepada pengguna frekuensi mengenai aturan yang berlaku, sehingga mereka dapat mematuhi ketentuan yang ada. Prinsip **Akuntabel** diterapkan dengan memastikan bahwa setiap tindakan penertiban dicatat dan dilaporkan secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses dan hasilnya. Nilai **Harmonis** diwujudkan melalui interaksi yang baik antara pegawai yang bertugas dengan pengguna frekuensi, menciptakan suasana kerja sama dalam menjaga

ketertiban penggunaan spektrum. Selain itu, sikap **Loyal** mendorong pegawai untuk berkomitmen pada tugas mereka dalam menegakkan aturan dan melindungi kepentingan publik. Dengan bersikap **Adaptif**, pegawai yang bertugas dapat menyesuaikan metode penertiban dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, prinsip **Kolaboratif** mengajak berbagai pihak terkait untuk bekerja sama dalam pengawasan dan penertiban, sehingga menciptakan sinergi yang efektif dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Dengan penerapan budaya **BerAKHLAK** ini, kegiatan penertiban menjadi lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PENERTIBAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Penertiban spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bertujuan untuk meminimalisasi pemborosan dan memastikan spektrum frekuensi radio dialokasikan kepada pihak-pihak yang paling membutuhkan dan mampu memanfaatkannya secara optimal. Agar setiap pengguna frekuensi radio yang berizin berhak untuk mendapatkan layanan telekomunikasi yang berkualitas tanpa gangguan serta melindungi hak dengan cara mencegah melalui edukasi, pembinaan dan penindakan terhadap adanya interferensi spektrum frekuensi radio dan pelanggaran regulasi, serta alat/perangkat telekomunikasi yang beredar di pasaran adalah yang bersertifikasi sehingga tidak menimbulkan interferensi.

5. IK 5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Merujuk pada perjanjian kinerja tahun 2024, sasaran yang telah ditetapkan meliputi pembuatan 12 laporan serta pencapaian tingkat operasional perangkat pendukung SMR dan alat monitoring/pengukuran sebesar 95%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, realisasi kinerja yang

didapat mencapai 100%, yang berarti target awal telah tercapai. Adapun untuk data capaian kinerja dari periode tahun 2020 s.d. 2024 dapat diamati melalui tabel dibawah ini.

Indikator Kegiatan	Kendala	Upaya yang telah dilakukan	Realisasi
Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	Pemeliharaan perangkat Transportable site Tabalong disebabkan kondisi perangkat mati total	1. Perbaikan Blok CPU FMU 306 2. Perbaikan DC to Dc Protection Board IHW013-81000-000D 3. Perbaikan Low gain pada signal Hound reciever 4. Penggantian SSD EVO870 2TB	Perangkat sudah berfungsi kembali tanggal 01 Oktober 2024
	Menurunkan kualitas layar pada perangkat Reciver PR 100	Penggantian LCD Display PR 100	Penggantian LCD Display PR 100 telah dilaksanakan pada bulan November 2024
	Pemeliharaan perangkat Fieldstrength disebabkan kondisi perangkat mati total	Melakukan Perbaikan : 1. Perbaikan tune dial 2. Pengesetan center Frequency 3. Penggantian Baterai 4. Power Dupplay External (Adapter)	Perangkat sudah berfungsi kembali bulan Oktober 2024
	Melaksanakan Karoseri Kendaraan	Pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga berupa Karoseri Kendaraan Monitoring Hillux Double Cabin 24 G (4x4) DSL M/T	Pekerjaan selesai bulan Juni 2024
	Melaksanakan Relokasi Instalasi, Uji Fungsi Perangkat MON DF	Pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga berupa : 1. Dismantle Mobil Elf dan Reinstalasi pada Toyota Hilux 2. Reinstalasi Perangkat di Toyota Hilux	Perangkat sudah berfungsi kembali bulan Juni 2024

TABEL REALISASI BERFUNGSIYA PERANGKAT PENDUKUNG SMFR DAN ALAT/MONITORING UKUR TAHUN 2020 – 2024

Indikator Kerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Presentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	2020	83%	66.49%	116%
	2021	85%	90%	105.88%
	2022	95%	100%	105.26%
	2023	95%	100%	105.26%
	2024	95%	100%	105.26%

Perangkat pendukung SMFR mencakup alat-alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemantauan, pengukuran, dan identifikasi spektrum frekuensi radio secara mandiri, terpisah dari perangkat utama. Alat-alat tersebut antara lain:

- *Spectrum Analyzer*
- *Portable Monitor*
- *Portable Receiver*
- Kendaraan Unit Monitoring termasuk Sistem Kelistrikan

- Antena dan kelengkapan perangkat SMF Penangkal Petir, GPS, UPS, *Tranceiver HF*, *Tranceiver VHF*, *Battery*, *Router*, *CCTV*, *Personal*
- *Computer (PC)*, Laptop, Tower, Antivirus dan AC.

Adapun beberapa kendala dan solusi yang telah ditindak lanjuti selama tahun 2024 dapat diamati melalui uraian tabel berikut ini.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT dapat dilihat dari beberapa aspek penting, antara lain:

- Nilai Berorientasi Pelayanan diimplementasikan dengan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pemantauan penggunaan frekuensi, dengan memastikan kondisi perangkat monitoring dalam keadaan berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan dilayani dengan baik dan sepenuh hati.
- Prinsip Akuntabel diterapkan melalui pelaporan yang transparan dan jelas mengenai hasil monitoring, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana penggunaan spektrum frekuensi radio dikelola.
- Sikap Harmonis ditunjukkan dengan menciptakan hubungan baik antara para pegawai yang bertugas untuk kegiatan monitoring dengan para pengguna frekuensi, sehingga tercipta komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada.
- Nilai Loyal terlihat dari komitmen petugas untuk menjaga integritas dan kualitas layanan monitoring demi kepentingan publik.
- Prinsip Kolaboratif mendorong kerja sama antara UPT, pengguna frekuensi, dan pihak terkait lainnya untuk menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN TERJAGANYA OPERASIONAL DAN FUNGSI MONITORING DARI STASIUN MONITOR FREKUENSI RADIO DI UPT

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisik alat (*hardware dan software*) yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, dan diharapkan data yang dihasilkan dapat mempertajam analisis kesiapan stasiun monitor dalam melaksanakan fungsi monitoring, memberikan informasi yang lebih akurat terkait pemanfaatan spektrum frekuensi yang sedang diamati. Sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

6. IK 5 Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT

Berdasarkan perjanjian kinerja pada tahun 2024 pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT di targetkan dapat terlaksana 100% dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah peserta 319 (tiga ratus sembilan belas) dalam 1 tahun. Adapun capaian yang di peroleh berkenaan dengan pelaksanaan UNAR di tahun 2024 berhasil dilaksanakan

sebanyak 13 kali atau dengan jumlah peserta sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) yang berpartisipasi. Dengan perolehan ini maka capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 134,17 %. Pada tabel dibawah ini dapat diamati uraian capaian kinerja dari periode tahun 2020-2024 terkait pelaksanaan UNAR.

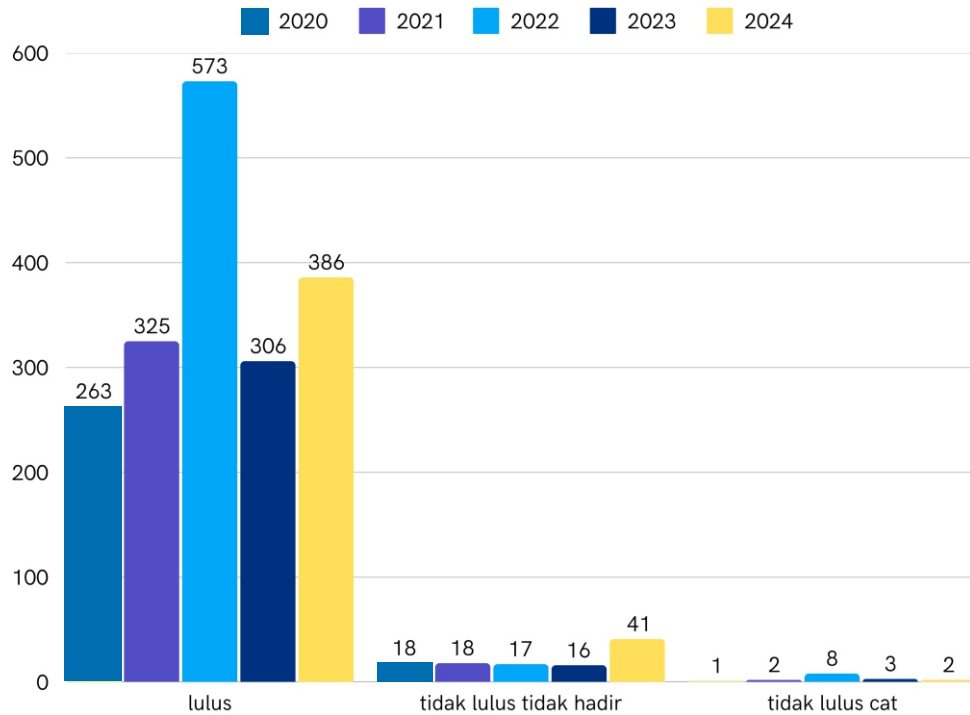
TABEL PELAKSANAAN UNAR DARI TAHUN 2020 S.D. 2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Perhitungan PK
1.	2020	100%	100%	Jumlah Peserta 282
2.	2021	100%	345%	Jumlah Peserta (Taeget 100% Realisasi 345)
3.	2022	100%	212,63%	Jumlah Peserta 598
4.	2023	100%	112,07%	Jumlah Peserta (Taeget 319 Realisasi 325)
5.	2024	100%	134,48%	Jumlah Peserta (Taeget 319 Realisasi 429)

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diamati bahwa pelaksanaan UNAR dari periode 2020-2024 selalu dapat memenuhi dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Sementara itu, untuk pelaksanaan UNAR tahun 2024 menggunakan perangkat tablet, dimana penggunaan perangkat tersebut sangat membantu proses UNAR mengingat bentuknya kecil, ringan, daya tahan baterai lebih lama dan yang utama adalah peserta UNAR lebih familiar menggunakannya seperti menggunakan telepon selular biasa. Meskipun dapat terlaksana sesuai dengan target, masih terdapat beberapa kendala pada saat pelaksanaan UNAR tahun 2024, diantaranya adalah:

- Aplikasi CAT sudah tidak mendukung lagi untuk penggunaan tablet sehingga harus menggunakan laptop;
- Jumlah laptop untuk keperluan UNAR belum ideal dibandingkan dengan jumlah peserta UNAR.

Dapat diamati pada uraian grafik dibawah ini, data dari pelaksanaan UNAR peridoe 2021-2024 terkait rincian peserta, kemudian tingkat kelulusan serta kehadiran pada saat pelaksanaan UNAR.

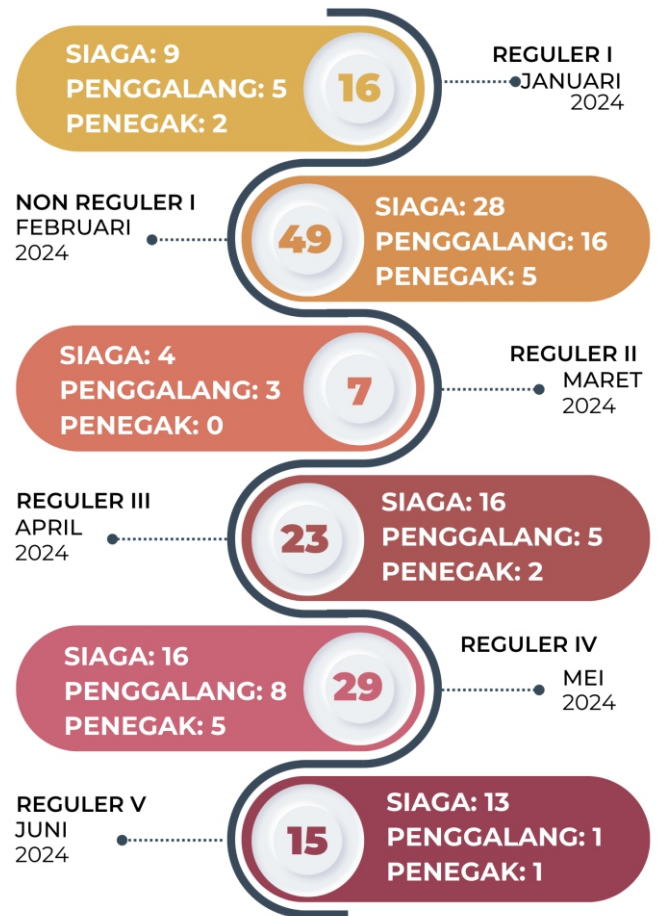
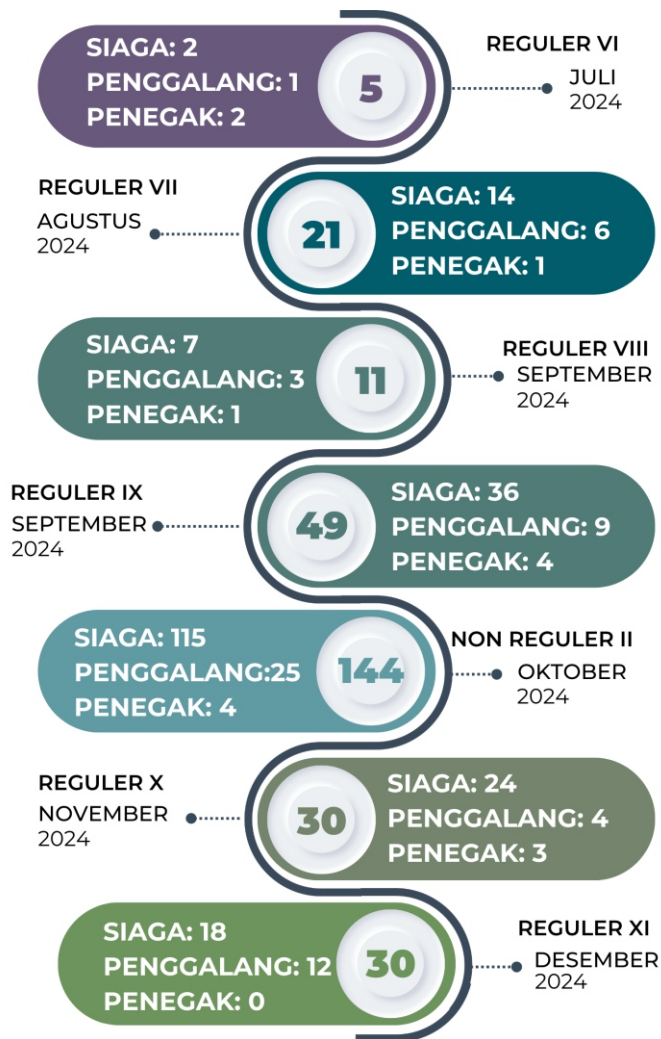


Melalui uraian data di atas, dapat diamati bahwa dari periode 2021-2024 jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan UNAR berkisar antara 345-598 peserta. Di mana jumlah peserta terbanyak terdapat pada tahun 2022 dengan total jumlah 573 peserta dinyatakan lulus CAT dari 598 total peserta. Sementara untuk data pada pelaksanaan tahun 2024, diketahui 386 peserta dinyatakan lulus (89,9%) dari total 429 peserta.

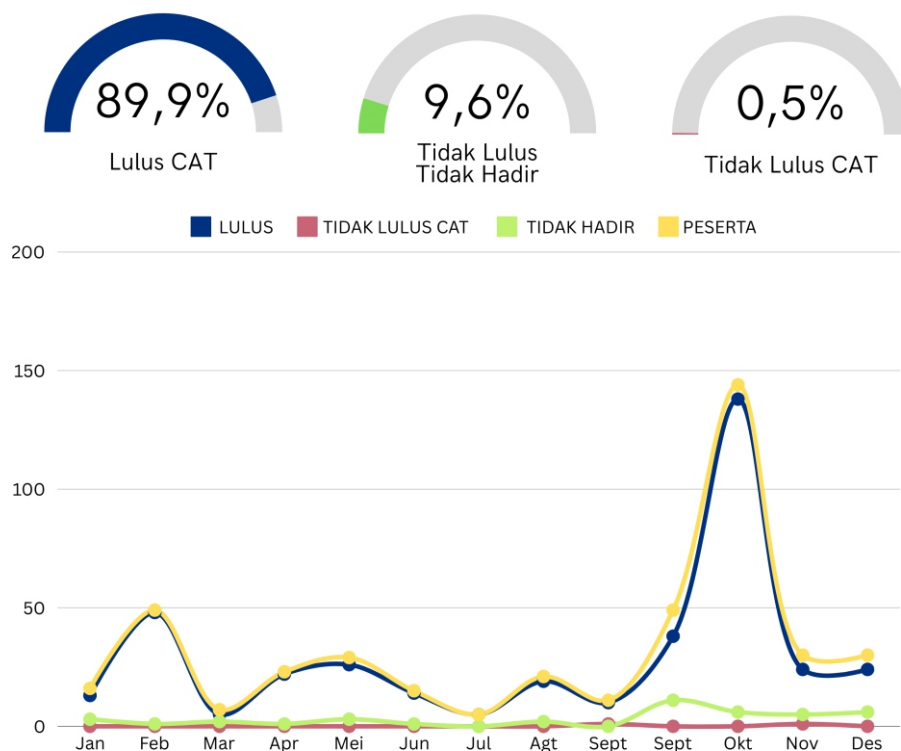
Dimana, 41 peserta dinyatakan tidak lulus (9,6%) dan tidak hadir sedangkan 2 peserta lainnya dinyatakan tidak lulus CAT (0,5%). Pada tahun 2024, pelaksanaan UNAR dilaksanakan sebanyak 13 kali dengan rincian 11 UNAR Reguler dan 2 UNAR non-reguler.

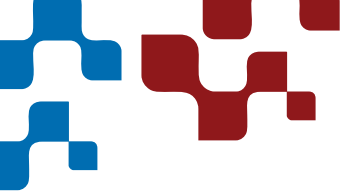
Adapun untuk rinciannya dapat diamati pada uraian data berikut ini.





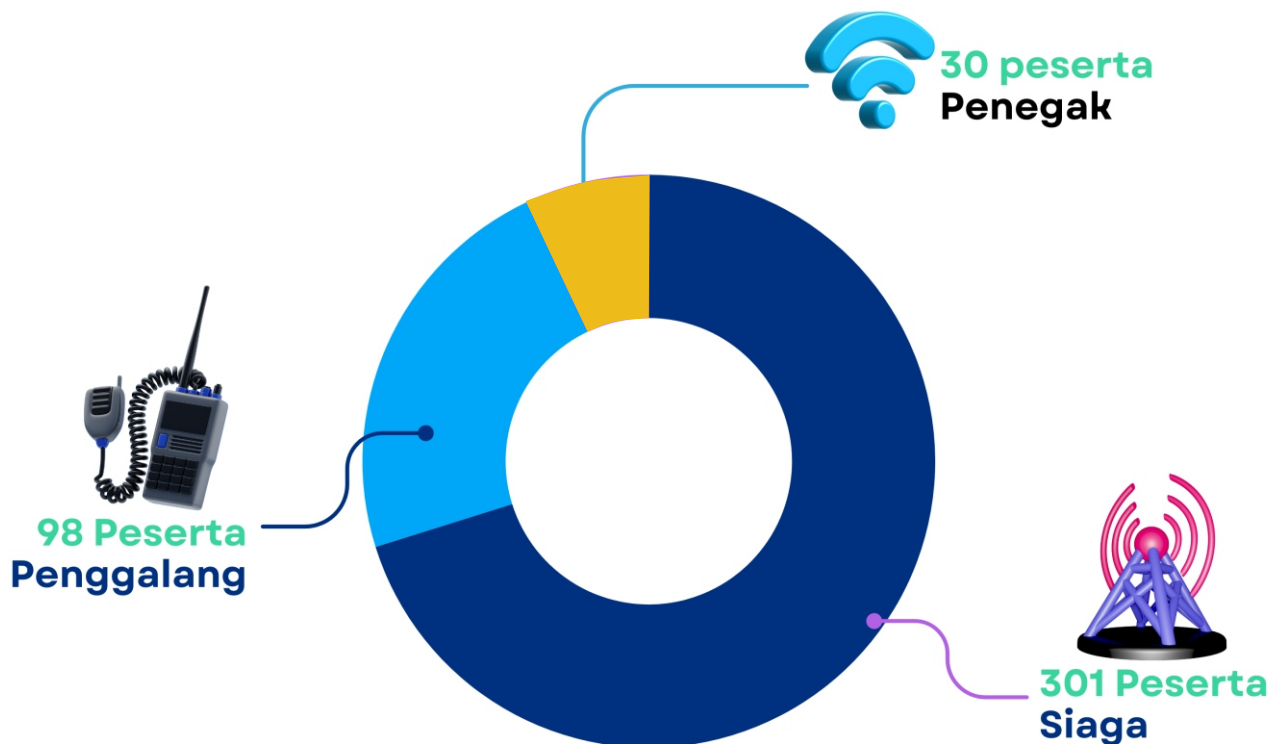
GRAFIK PELAKSANAAN UNAR 2024





Adapun uraian data diatas menjelaskan perbandingan jumlah peserta yang lulus CAT, kemudian tidak lulus dan tidak hadir, serta tidak lulus CAT selama periode tahun 2024. Adapun dari uraian data tersebut dapat diamati bahwa jumlah peserta terbanyak yang berpartisipasi terdapat pada UNAR yang dilaksanakan pada bulan Oktober. Sementara untuk UNAR dengan jumlah peserta terendah terdapat pada pelaksanaan di bulan Maret dan Juli. Lebih lanjut lagi dari total 428 jumlah peserta yang

berpartisipasi pada UNAR tahun 2024, diketahui jumlah peserta terbanyak terdapat pada tingkatan Siaga dengan jumlah 301 peserta. Kemudian diikuti 98 peserta pada tingkat penggalang, dan 30 peserta pada tingkat penegak. Rinciannya dapat diamati pada grafik dibawah ini, berikut dengan serangkaian dokumentasi kegiatan UNAR tahun 2024.



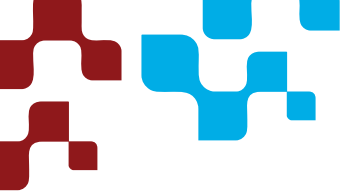
Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT (Computer Assisted Test) terlihat jelas dalam beberapa aspek antara lain:

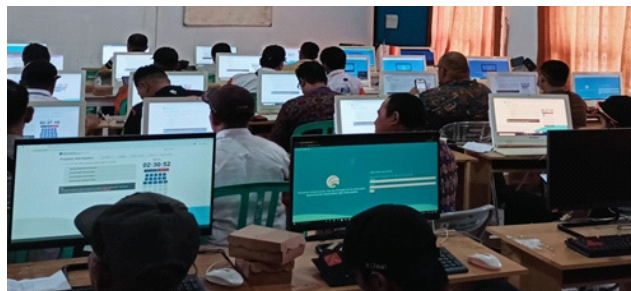
- Berorientasi Pelayanan diwujudkan dengan memberikan kemudahan akses bagi peserta ujian untuk mendaftar dan mengikuti ujian secara online, sehingga mereka merasa dilayani dengan baik.
- Prinsip Akuntabel diterapkan melalui sistem yang transparan, di mana hasil ujian dapat langsung diketahui oleh peserta, memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Prinsip Akuntabel diterapkan melalui sistem yang transparan, di mana hasil ujian dapat langsung diketahui oleh peserta, memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nilai Harmonis terlihat dalam interaksi positif antara penyelenggara dan peserta, menciptakan suasana yang mendukung dan kolaboratif selama proses ujian.
- Selain itu, sikap Loyal ditunjukkan oleh penyelenggara yang berkomitmen untuk menjaga integritas dan kualitas ujian demi kepentingan publik.
- Dengan bersikap Adaptif, penyelenggara dapat menyesuaikan sistem ujian dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta.
- Prinsip Kolaboratif mendorong kerja sama antara berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ujian.
- Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, kegiatan ujian menjadi lebih efisien, adil, dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ujian yang ada.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PESERTA UJIAN NEGARA AMATIR RADIO BERBASIS CAT

Dengan UNAR berbasis CAT, proses ujian menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, dan masyarakat juga dapat lebih yakin bahwa para amatir radio yang lulus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas komunikasi radio, yang sangat penting dalam situasi darurat dan bencana. Peserta yang lulus ujian mendapatkan sertifikat kecakapan amatir radio, yang memberikan legalitas untuk menggunakan frekuensi radio. Ini membantu mengurangi penggunaan frekuensi secara ilegal dan meningkatkan tertibnya penggunaan spektrum frekuensi di masyarakat.



Pelaksanaan UNAR Non Reguler I tahun 2024



Pelaksanaan UNAR Non Reguler I tahun 2024



Pelaksanaan UNAR Non Reguler II tahun 2024



Pelaksanaan UNAR Non Reguler II tahun 2024



Pelaksanaan UNAR Reguler tahun 2024



Pelaksanaan UNAR Reguler tahun 2024



Pelaksanaan UNAR Reguler tahun 2024



Peserta Disabilitas UNAR Reguler tahun 2024



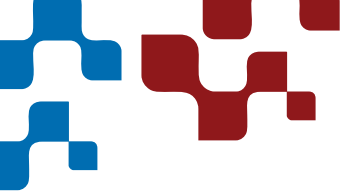
7. IK 7 Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024, untuk Penanganan Piutang ditargetkan mencapai 100% dihubungi dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL ditargetkan mencapai 100% atau sebanyak 4 (empat) kali kegiatan. Realisasi penanganan piutang disampaikan melalui pos, telepon, email, dan pengantaran secara langsung dengan total berkas sejumlah 438 yang telah disampaikan seluruhnya (100%), sementara untuk realisasi koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL dilaksanakan

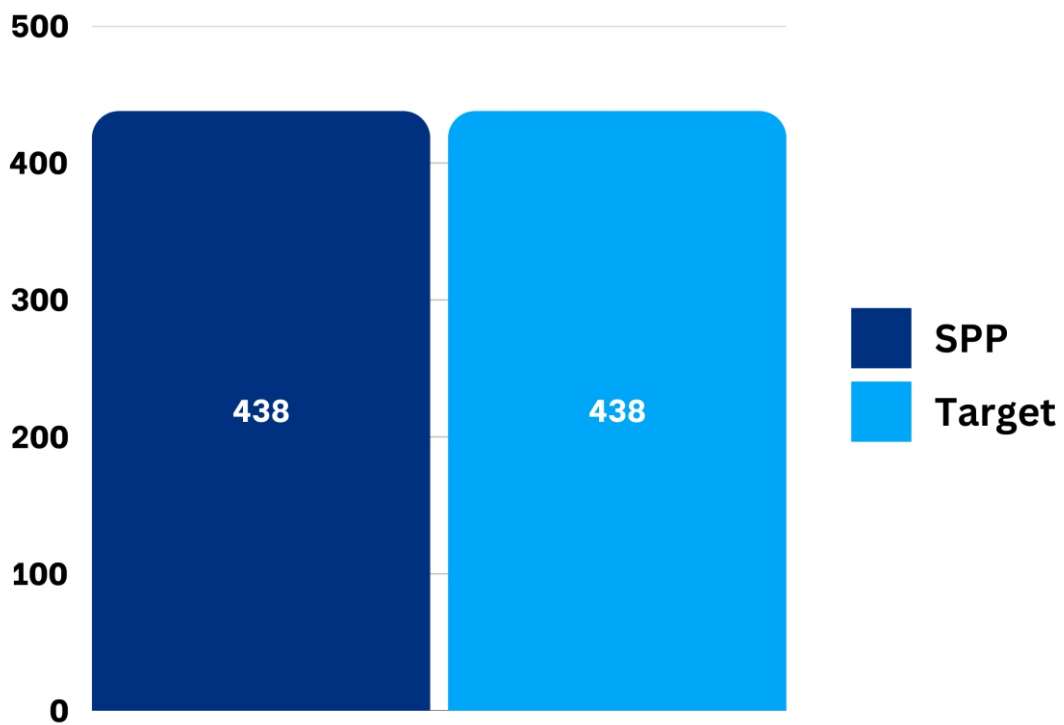
sebanyak empat (empat) kali kegiatan atau telah dilaksanakan sepenuhnya (100%). Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2024 dapat memenuhi target dengan capaian kinerja 100%. Adapun rincian realisasi dan target pada tahun 2024 dapat diamati pada grafik berikut. Sedangkan tabel berikut ini merupakan tabel yang menguraikan data dari periode 2020-2024 terkait pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL.

TABEL PELAKSANAAN PENANGANAN PIUTANG DAN KOORDINASI PELIMPAHAN PIUTANG KE KPKNL DARI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024

Tahun	Target	Realisasi = capaian (a) + Capaian (b) / 2
2020	Pelayanan publik terkait pendampingan penyelesaian piutang Negara BHP Frekuensi Radio 100% Target 12 Laporan	Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 446 berkas melalui Pos, Telepon, Email dan diantar langsung Realisasi 12 Laporan (100%)
2021	Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio 100% (4 kali koordinasi dan jumlah penyampaian tagihan) Target 100%	Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 445 berkas melalui Pos, Telepon, Email dan diantar langsung (100%). Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali koordinasi (100%) Realisasi 112.5%
2022	Pelayanan publik terkait pendampingan penyelesaian piutang Negara BHP Frekuensi Radio 100% Target 100%	Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 422 berkas melalui Pos, Telepon, Email dan diantar langsung Realisasi 212.63%
2023	Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio 100% (4 kali koordinasi dan jumlah penyampaian tagihan) Target 100%	Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 445 berkas melalui Pos, Telepon, Email dan diantar langsung (100%). Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali koordinasi (100%) Realisasi 100%
2024	Penanganan Piutang dihubungi 100% dan pelimpahan KPKNL 100% Pendampingan Target 100%	Capaian penyampaian piutang melalui Pos, Telepon, Email dan diantar langsung (100%). Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali koordinasi (100%) Realisasi 100%



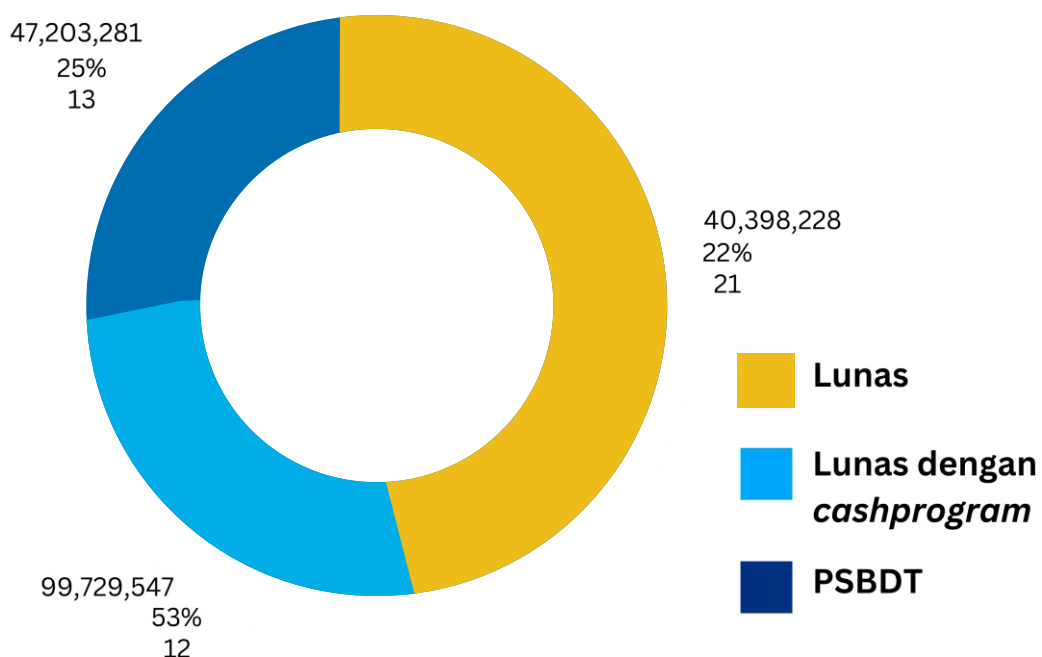
GRAFIK REALISASI DAN CAPAIAN PK PENANGANAN PIUTANG TAHUN 2024



Berdasarkan data yang diperoleh saat ini, beberapa alamat wajib bayar sudah tidak ditemukan, adapula yang berpindah alamat ataupun keterangan lainnya. Akan tetapi, tetap diupayakan secara maksimal agar SPP tetap dapat tersampaikan.

Selama tahun 2024 tidak ada pelimpahan pengurusan piutang ke KPKNL. Adapun rincian data terkait status proses penanganan piutang KPKNL hingga Desember 2024 dapat diamati melalui grafik berikut:

GRAFIK PELIMPAHAN PENGURUSAN PIUTANG KPKNL HINGGA AKHIR TAHUN 2024



Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks ini, nilai Berorientasi Pelayanan diterapkan dengan memberikan layanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat terkait pengelolaan piutang, sehingga mereka merasa diperhatikan. Prinsip Akuntabel memastikan bahwa setiap langkah dalam penanganan piutang dicatat dan dilaporkan secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat proses dan hasilnya. Nilai Harmonis diwujudkan melalui komunikasi yang baik antara petugas dan debitur, menciptakan suasana kerja sama dalam

menyelesaikan masalah piutang. Selain itu, sikap Loyal mendorong pegawai untuk berkomitmen pada tugas mereka dalam menegakkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan piutang. Dengan bersikap Adaptif, para pegawai yang bertugas dapat menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi dan kebutuhan debitur. Dan dengan prinsip Kolaboratif mendorong kerja sama antara berbagai instansi terkait, termasuk KPKNL, untuk memastikan proses pelimpahan piutang berjalan lancar. Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, kegiatan penanganan piutang menjadi lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PENANGANAN PIUTANG DAN KOODINASI PELIMPAHAN KE KPKNL

Pelaksanaan indikator kegiatan penanganan piutang memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan adanya upaya ini, masyarakat yang memiliki kewajiban piutang dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam melunasi utang. Selain itu, penanganan piutang yang efektif membantu mengurangi konflik sosial akibat utang macet dan memberikan kejelasan dalam proses penyelesaian, baik melalui penagihan maupun restrukturisasi. Dampaknya juga terasa pada stabilitas ekonomi lokal, karena pengelolaan piutang yang baik memungkinkan masyarakat untuk kembali fokus pada aktivitas produktif. Secara keseluruhan, kegiatan ini mendukung terciptanya lingkungan keuangan yang lebih sehat dan transparan.

8. IK 8 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Sosialisasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun 2024, pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik 100% dengan 1 (satu) kali kegiatan. Sosialisasi pelayanan publik dilaksanakan dengan target 100% dari wilayah kerja atau 13 Kota/Kabupaten se-Kalimantan Selatan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat

melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan target yang dicapai dan mengulang keberhasilan untuk mencapai target seperti tahun sebelumnya. Rincian pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

TABEL PERBANDINGAN KEGIATAN SOSIALIASI DARI TAHUN 2020–2024

Tahun	Target	Realisasi
2020	-	-
2021	Sosialisasi (pengguna frekuensi, pemerintah dan pelaku usaha) dilaksanakan dengan mengundang 7 kabupaten/kota 1 kali sosialisasi (Target 80%)	Terlaksana sosialisasi yang dihadiri 13 Kabupaten/ Kota secara online (Realisasi 125%)
2022	Sosialisasi (pengguna frekuensi, pemerintah dan pelaku usaha) dilaksanakan dengan mengundang 13 kabupaten/kota 1 kali sosialisasi (Target 100%)	Terlaksana sosialisasi yang dihadiri 13 Kabupaten/ Kota secara online (Realisasi 212.63%)
2023	Sosialisasi (pengguna frekuensi, pemerintah dan pelaku usaha) dilaksanakan dengan mengundang 13 kabupaten/kota 1 kali sosialisasi (Target 100%)	Terlaksana sosialisasi yang dihadiri 13 Kabupaten/ Kota secara online (Realisasi 100%)
2024	Sosialisasi (pengguna frekuensi, pemerintah dan pelaku usaha) dilaksanakan dengan mengundang 13 kabupaten/kota 1 kali sosialisasi (Target 100%)	Terlaksana sosialisasi yang dihadiri 13 Kabupaten/ Kota secara online (Realisasi 100%)

Kegiatan sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan mengundang pengguna frekuensi, pemerintah dan pelaku usaha dari 13 Kabupaten/Kota yang terdapat dalam wilayah kerja. Adapun kegiatan sosialisasi yang dapat terlaksana, dilaksanakan pada 13 Juni 2024 di Banjarmasin. Kegiatan sosialisasi pelayanan publik yang berhasil dilaksanakan mengundang Narasumber sebagai berikut:

- Ade Mulyana, ST., MM (Direktorat Standardisasi PPI Ditjen SDPPI), dengan materi “Perangkat telekomunikasi yang menggunakan Pita frekuensi Izin Kelas.”
- Yogo Prihandoko, SE., MA (Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI), dengan materi “Sanksi Administrasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan Perangkat Telekomunikasi.”
- Wahyu Pamungkas, ST (Balmon Banjarmasin), dengan materi “Profil Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin.”





2. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dilakukan melalui survei mandiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melalui aplikasi dari Direktorat Operasi Sumber Daya. Kegiatan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2024 melibatkan 124 responden yang

berpartisipasi, jumlah responden ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun capaian Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun 2023 dapat diamati melalui Tabel serta grafik dibawah ini.

TABEL PERBANDINGAN HASIL SURVEI KUALITAS DAN INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK DARI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024

No	TAHUN	IIPP	IKM	JUMLAH RESPONDEN
1.	2020	(IKP 81,16)	(IKP 81,16)	132
2.	2021	(IKP 86,67)	(IKP 86,67)	94
3.	2022	-	92.04	76
4.	2023	3.81	3.87	64
5.	2024	3.93	3.92	124

Mutu Pelayanan

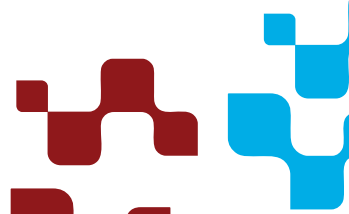
SANGAT BAIK

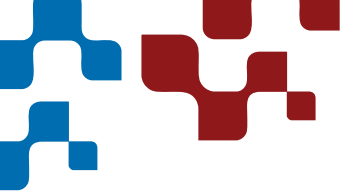
IIPP 3.93

IKM 3.92

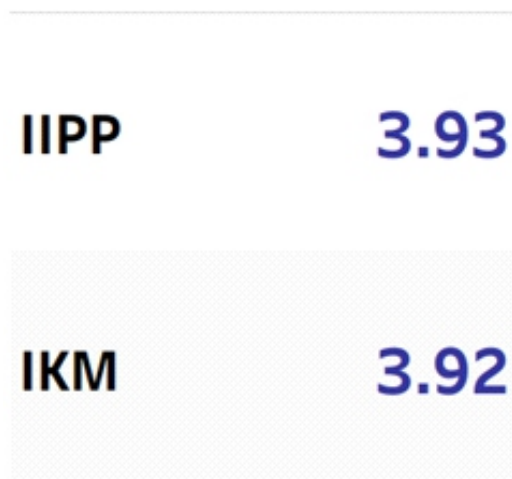
Berdasarkan data dari hasil survei yang diperoleh melalui survei pelayanan publik tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, diperoleh hasil dengan predikat mutu pelayanan sangat baik dengan IIPP sebesar 3,93 dan IKM sebesar 3,92. Kegiatan survei dilaksanakan melalui

kegiatan sosialisasi frekuensi radio, bimbingan teknis LRC, UNAR, serta konsultasi dan asistensi pada loket pelayanan. Adapun untuk rincian dari hasil kegiatan survei pelayanan publik tahun 2024 dapat diamati melalui tabel berikut ini.



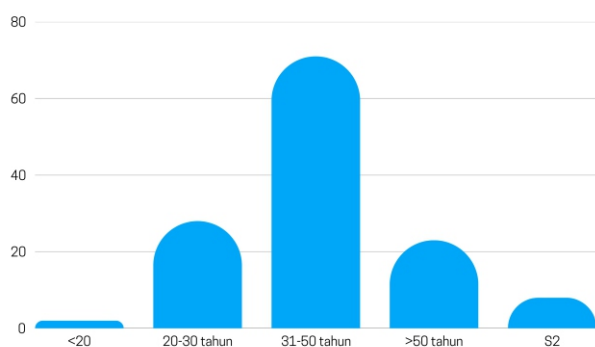


HASIL SURVEY PELAYANAN PUBLIK – BALMON SFR KELAS II BANJARMASIN

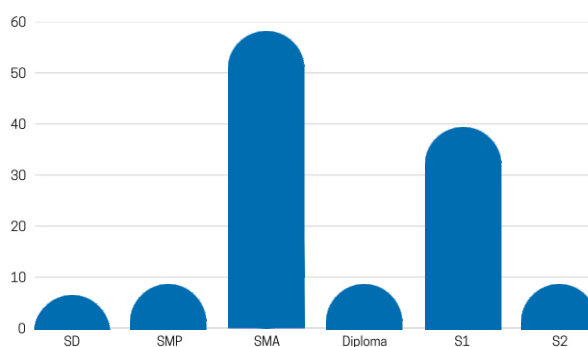


IIPP-IKM-	Kategori	Indeks
IIPP	Diskriminasi Pelayanan	3.93
	Pelayanan Di Luar Prosedur	3.94
	Penerimaan Imbalan	3.94
	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.91
	Pungutan Liar (Pungli)	3.92
IKM	Biaya/tarif	3.90
	Kompetensi Pelaksana	3.90
	Penanganan Pengaduan, Saran dan M..	3.94
	Perilaku Pelaksana	3.94
	Persyaratan	3.90
	Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.91
	Sarana dan Prasarana	3.93
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.90
	Waktu Penyelesaian	3.92

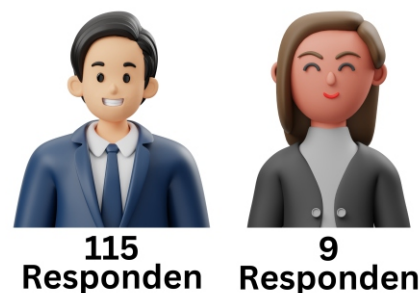
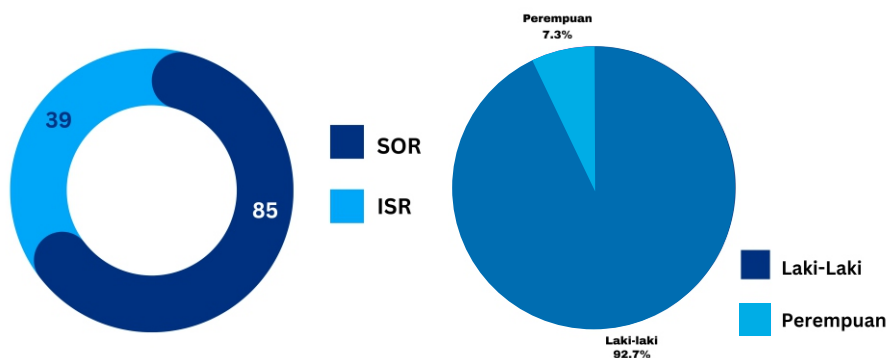
KATEGORI USIA



PENDIDIKAN TERAKHIR



GAMBAR RESPONDEN SURVEI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024



Berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan survei pelayanan publik tahun 2024 oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, dari 124 jumlah responden terdiri atas 115 responden pria (92,7%), sedangkan 9 responden lainnya perempuan (7,3%). Sementara itu, dari kategori usia diperingkat teratas terdiri atas responden dengan usia dari 31-50 tahun,

diikuti responden dengan usia dari 20-30 tahun diperingkat kedua, serta responden >50 tahun diperingkat ketiga. Kemudian, dari 124 responden diketahui mayoritas berpendidikan terakhir pada jenjang SMA dan Strata-1 (S1).



Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Dalam kegiatan sosialisasi, nilai Berorientasi Pelayanan terlihat dari upaya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mereka merasa dilayani dengan baik. Prinsip Akuntabel diterapkan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur layanan dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin secara transparan. Nilai Harmonis diwujudkan melalui interaksi positif antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Kelas II Banjarmasin dan masyarakat, menciptakan suasana saling percaya dan mendukung. Selain itu, sikap Loyal mendorong untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik, sementara Adaptif memungkinkan untuk menyesuaikan layanan berdasarkan umpan balik dari Survei Kepuasan Masyarakat. Dan dalam prinsip Kolaboratif mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah juga akan semakin baik.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Melalui sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya penggunaan frekuensi radio yang legal dan sesuai dengan regulasi, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dalam menggunakan spektrum frekuensi radio. Kegiatan ini juga membantu mengurangi praktik penggunaan frekuensi secara ilegal, yang seringkali menyebabkan gangguan pada layanan komunikasi lainnya. Selain itu, survei kepuasan masyarakat memberikan umpan balik yang berharga bagi penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat merasa lebih diperhatikan dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendidik masyarakat tentang penggunaan frekuensi yang tepat tetapi juga menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih aman dan efektif, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Spektrum Frekuensi Radio.

9. IK 9 Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC

Pada perjanjian kinerja tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin ditargetkan untuk dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis untuk operator radio dinas maritim yakni *Short Range Certification* (SRC) / *Long Range Certification* (LRC) dengan jumlah peserta minimal 40 orang. Berdasarkan data yang diperoleh hingga akhir tahun 2024, Balai monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin

telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC dengan jumlah peserta yang berpartisipasi sebanyak 58 orang. Dengan perolehan tersebut maka capaian indikator kinerja yang dicapai adalah sebesar 145 %. Adapun untuk perbandingan capaian pelaksanaan bimtek SRC/LRC dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat diamati dari uraian tabel berikut.

No	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	2020	-	-	-
2.	2021	90%	117.78%	130.87%
3.	2022	100%	212.63%	212.63%
4.	2023	100%	226.32%	226.32%
5.	2024	100%	145%	145%

Berdasarkan uraian data pada tabel diatas, dapat diamati bahwa selama 2 tahun terakhir, pelaksanaan kegiatan sosialisasi bimbingan teknis SRC/LRC dapat terlaksana dengan baik. Terlebih lagi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat melampaui target peserta yang diharapkan untuk berpartisipasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam kegiatan

Bimtek SRLC/LRC antara lain dalam seperti kesulitan untuk dapat mengumpulkan nelayan pada suatu tempat, karena harus menyesuaikan dengan jadwal nelayan pergi melaut. Minat dan kesadaran Nelayan untuk mengikuti Bimtek juga masih perlu ditingkatkan.

**RINCIAN KEGIATAN BIMTEK SLR/LRC YANG TERLAKSANA DI TAHUN 2024
DIURAIKAN MELALUI TABEL BERIKUT:**

No	TANGGAL	TEMPAT	PESERTA
1.	29 Februari 2024	Desa Swarangan Kabupaten Tanah Laut	20
2.	7 Juni 2024	Desa Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut	19
3.	25 September 2025	Kota Banjarmasin	19
Jumlah			58

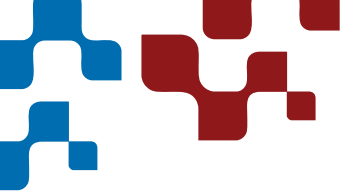
Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis SRC/LRC terlihat dalam beberapa aspek penting yaitu Berorientasi Pelayanan diimplementasikan dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada peserta tentang penggunaan frekuensi radio dan regulasi yang berlaku, sehingga mereka merasa dilayani dengan baik. Prinsip Akuntabel diterapkan melalui pelaporan yang transparan mengenai hasil sosialisasi dan bimbingan teknis, memastikan bahwa setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai Harmonis diwujudkan dalam interaksi positif antara penyelenggara dan peserta, menciptakan suasana kerja sama yang mendukung pembelajaran. Selain itu, sikap Loyal

mendorong penyelenggara untuk berkomitmen dalam meningkatkan kompetensi peserta agar dapat menggunakan frekuensi radio secara efektif dan sesuai aturan. Dengan bersikap Adaptif, penyelenggara dapat menyesuaikan materi dan metode bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta. Dan prinsip Kolaboratif mendorong kerja sama antara berbagai pihak terkait untuk memastikan sosialisasi berjalan lancar dan efektif. Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis menjadi lebih efisien, meningkatkan pemahaman peserta tentang penggunaan frekuensi radio yang benar.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SRC/LRC

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC (Sertifikasi Operator Radio Jarak Jauh dan Radio Jarak Dekat) memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi para nelayan dan pelaku usaha di sektor maritim. Melalui bimbingan teknis ini, peserta mendapatkan edukasi mendalam mengenai peraturan dan regulasi komunikasi radio yang relevan, serta keterampilan praktis dalam penggunaan alat komunikasi radio. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif di laut, tetapi juga memperkuat keselamatan saat beroperasi di perairan, terutama dalam situasi darurat. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan ini, masyarakat dapat mengurangi risiko gangguan komunikasi yang dapat membahayakan keselamatan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional di sektor perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban penggunaan frekuensi radio dan berkontribusi pada pengelolaan sumber daya frekuensi yang lebih baik dan berkelanjutan.



Pembukaan dan Sambutan dari Kabalmon



Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC tahun 2024



Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC tahun 2024



Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC tahun 2024



Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC tahun 2024



Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC tahun 2024



Pembukaan dan Sambutan dari Kabalmon



Pembukaan dan Sambutan dari Kabalmon



Pembukaan dan Sambutan dari Kabalmon



10. IK 10 Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN

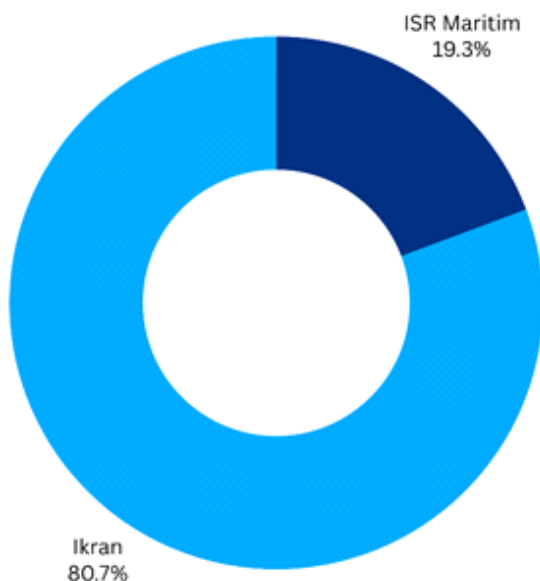
Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menargetkan jumlah ISR Maritim Nelayan dan Program MOTS IKRAN sebanyak 40. Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan akhir Desember 2024, izin yang diterbitkan berjumlah 57 izin dengan rincian 11 izin stasiun

radio (ISR) maritim nelayan serta 46 izin komunikasi radio perikanan (IKRAN). Dengan perolehan tersebut maka capaian indikator kinerja yang telah dicapai adalah sebesar 142,50%. Adapun untuk perbandingan capaian tahun 2020-2024 dapat diamati melalui tabel berikut ini.

No	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2020	-	Penerbitan ISR Maritim sebanyak 10 lembar
2.	2021	Penerbitan ISR Maritim 10 ISR (Target 90%)	Penerbitan ISR Maritim sebanyak 12 lembar (Realisasi 130.87%)
3.	2022	(Target 100%)	Penerbitan ISR Maritim sebanyak 26 lembar (Realisasi 212.63%)
4.	2023	penerbitan ISR Maritim Nelayan dan Ikran minimal 40 ISR (Target 100%)	Penerbitan ISR Maritim sebanyak 86 lembar (Realisasi 645%)
5.	2024	ISR Maritim Nelayan dan Ikran minimal 40 ISR (Target 100%)	Penerbitan ISR Maritim sebanyak 57 lembar (Realisasi 556.67%)

Berdasarkan data uraian tabel diatas, dapat diamati dalam 2 tahun terakhir perbandingan capaian program MOTS dapat memenuhi target yang ingin dicapai bahkan melebihi dari target tersebut. Tetapi selama proses pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala antara lain seperti kesadaran Nelayan atau pemilik kapal dalam

melengkapi kapal dengan dokumen ISR masih perlu ditingkatkan, kemudian terkait pemenuhan dokumen ISR Kapal masih banyak kapal nelayan yang belum memenuhi dokumen yang disyaratkan. Rincian data terkait capaian program MOTS 2024 dapat diamati melalui uraian data berikut:



JENIS	JUMLAH
ISR Maritim	11
Ikran	46
JUMLAH	57

Implementasi Budaya BerAKHLAK

- Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN terlihat dalam berbagai aspek yang mendukung peningkatan kualitas layanan bagi nelayan. Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan dengan memberikan akses yang mudah bagi nelayan untuk mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) dan mendapatkan informasi terkait penggunaan frekuensi radio. Prinsip Akuntabel diterapkan melalui transparansi dalam proses pengurusan izin, sehingga nelayan dapat mengetahui status permohonan mereka.
- Selain itu, nilai Harmonis tercermin dalam interaksi positif antara petugas dan nelayan, menciptakan suasana saling percaya dan kolaborasi.
- Sikap Loyal ditunjukkan oleh komitmen petugas untuk membantu nelayan dalam memahami regulasi dan penggunaan alat komunikasi yang tepat. Dengan bersikap Adaptif, penyelenggara dapat menyesuaikan layanan berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh nelayan. Terakhir, prinsip Kolaboratif mendorong kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan komunitas nelayan, untuk memastikan keberhasilan program ini.
- Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, program MOTS-IKRAN tidak hanya meningkatkan efisiensi pengurusan izin tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat nelayan.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN ISR MARITIM NELAYAN PROGRAM MOTS-IKRAN

Pelaksanaan kegiatan ISR Maritim Nelayan dalam program MOTS-IKRAN memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya para nelayan. Program ini mempermudah nelayan dalam mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) dan sertifikasi perangkat komunikasi tanpa perlu pergi jauh ke kantor layanan, karena loket layanan ini juga ada di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin. Dengan begitu, nelayan bisa menghemat waktu dan biaya. Selain itu, program ini juga memberikan edukasi kepada nelayan tentang pentingnya menggunakan frekuensi radio yang legal dan alat komunikasi yang sesuai aturan. Hal ini sangat penting untuk mencegah gangguan komunikasi dan memastikan keselamatan mereka saat melaut. Dengan perangkat komunikasi yang sudah tersertifikasi, nelayan bisa lebih mudah meminta bantuan jika terjadi keadaan darurat di laut. Secara keseluruhan, program ini membantu meningkatkan kemudahan layanan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan para nelayan.

11. IK 11 Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR

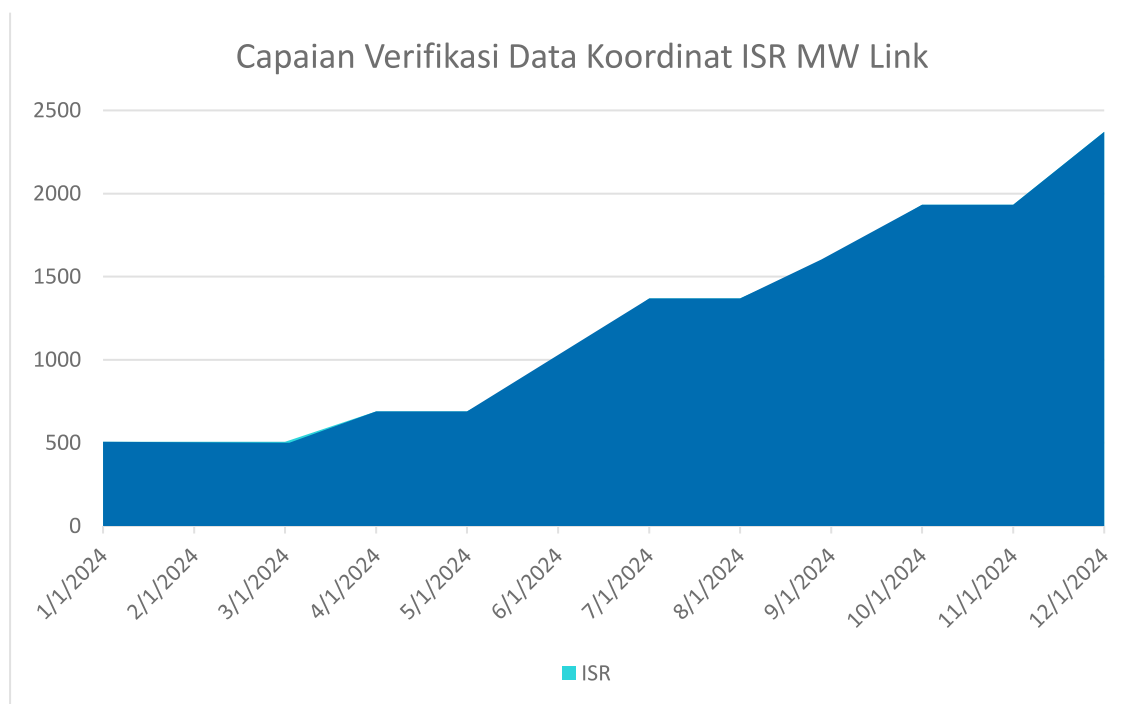
Berdasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2024, Pelaksanaan Verifikasi Data Koordinat Site ISR Tahun 2024 memiliki target sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dengan target sebanyak data. Adapun data koordinat site ISR microwave link yang telah terverifikasi sebanyak

2371 atau capaian 100%. Adapun untuk rincian data yang telah terverifikasi dari 7 (tujuh) kabupaten/kota dapat diamati melalui uraian tabel berikut:

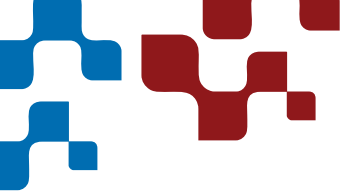
No	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	Kab. Barito Kuala	506	100%
2.	Kab. Tapin	184	
3.	Kab. Hulu Sungai Selatan	282	
4.	Kab. Hulu Sungai Tengah	396	
5.	Kab. Hulu Sungai Utara	244	
6.	Kab. Batangan	320	
7.	Kab. Tabalong	439	
JUMLAH		2371	

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diamati bahwa ISR terverifikasi dengan jumlah terbanyak terdapat di Kab. Barito Kuala dengan jumlah sebanyak 506 ISR, diikuti dengan Kab. Tabalong dengan jumlah ISR sebanyak 439. Sedangkan untuk ISR terverifikasi dengan jumlah paling

sedikit terdapat di Kab. Tapin dengan jumlah sebanyak 184 ISR. Adapun untuk rincian verifikasi data koordinat ISR MW Link selama periode tahun 2024 dapat diamati melalui grafik berikut.



Grafik Capaian Verifikasi Data Koordinat ISR MW Link



Selama proses pelaksanaan kegiatan verifikasi data, masih terdapat kendala yang dihadapi seperti tidak adanya dana khusus yang mengakomodir kegiatan

verifikasi data koordinat ISR MW Link, sehingga mengakibatkan kegiatan menunggu ketersediaan dana dari kegiatan lainnya.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

- Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan verifikasi data koordinat site ISR mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan frekuensi radio. Nilai Berorientasi Pelayanan terlihat dari upaya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemohon izin mengenai lokasi dan penggunaan frekuensi. Prinsip Akuntabel diterapkan melalui pencatatan dan pelaporan yang transparan mengenai hasil verifikasi, sehingga semua pihak dapat mempertanggungjawabkan proses yang dilakukan.
- Selain itu, nilai Harmonis diwujudkan dalam interaksi positif antara petugas dan masyarakat,
- menciptakan suasana kerja sama dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi. Sikap Loyal mendorong petugas untuk berkomitmen dalam menjalankan tugas verifikasi dengan integritas. Dengan bersikap Adaptif, petugas dapat menyesuaikan metode verifikasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, prinsip Kolaboratif mendorong kerja sama antara berbagai instansi terkait untuk memastikan proses verifikasi berjalan lancar.
- Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, kegiatan verifikasi menjadi lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN VERIFIKASI DATA KOORDINAT SITE ISR

Dengan melakukan kegiatan verifikasi data koordinat site ISR ini, pihak berwenang dapat memastikan bahwa lokasi stasiun radio beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan, sehingga mengurangi risiko gangguan frekuensi yang dapat mempengaruhi layanan komunikasi lainnya. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan jaringan komunikasi, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk atau strategis. Selain itu, verifikasi data koordinat site yang akurat juga membantu dalam pengelolaan spektrum frekuensi secara efektif, memastikan bahwa semua pengguna frekuensi mematuhi regulasi yang ada. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih handal dan aman, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem komunikasi yang ada. Secara keseluruhan, kegiatan ini mendukung terciptanya lingkungan komunikasi yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.



SASARAN

2

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

12. IK – Nilai Kinerja Anggaran UPT

Pengukuran kinerja tahun 2024 pelaksanaan anggaran dilakukan dengan cara menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikator nilai Capaian IKPA dan SMART Kemenkeu. Tahun 2024 capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin yang diperoleh adalah sebesar 90,43% dari target yang ditetapkan sebesar 87%. Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memperoleh nilai akhir dengan persentase sebesar 94,25%. Adapun terkait rincian data yang mencakup kualitas perencanaan anggaran, kemudian kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran dapat diamati melalui uraian data pada tabel dan grafik berikut.

TABEL RINCIAN INDIKATOR IKPA BALMON KELAS II BANJARMASIN TAHUN 2024 CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN PADA APLIKASI SMART KEMENTERIAN KEUANGAN



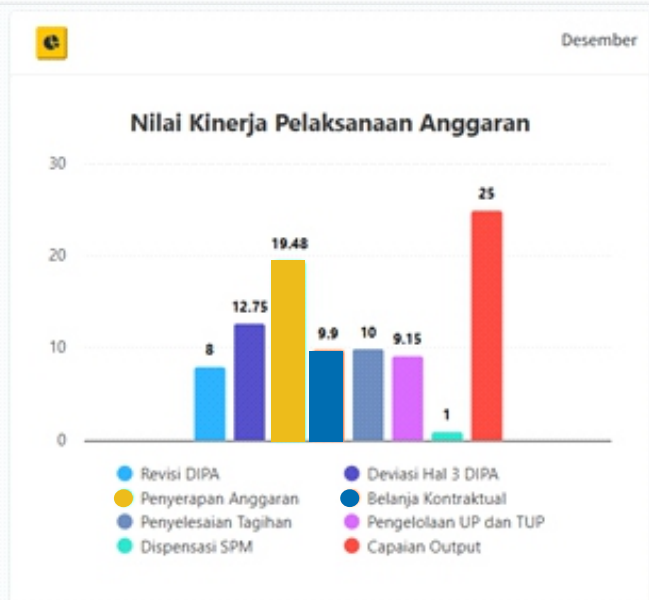
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

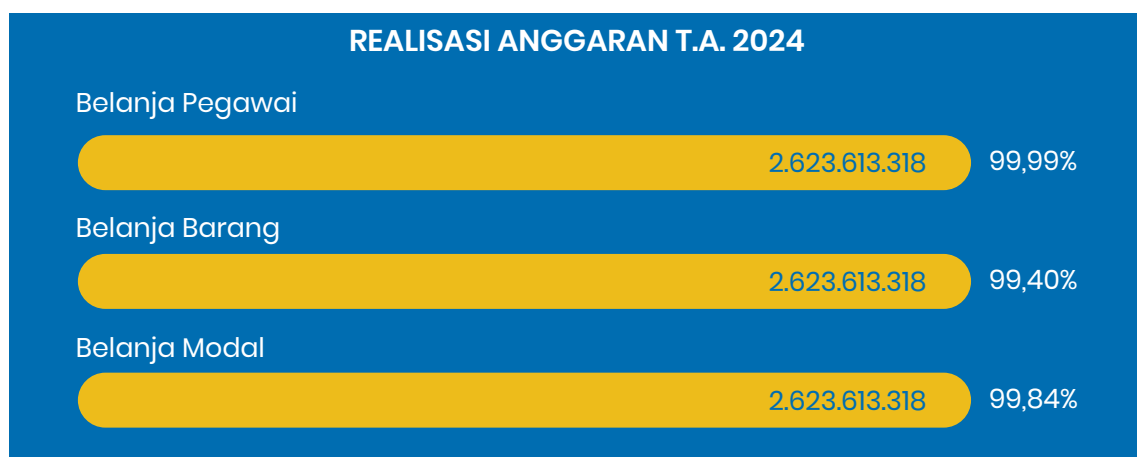
Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	045	059	654141	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN	Nilai	80.00	85.02	97.39	99.00	100.00	91.18	100.00	94.25	100%	0.00	94.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	12.75	19.48	9.90	10.00	9.12	25.00				
					Nilai Aspek	82.51		96.89				100.00				



Sementara itu untuk Pagu Anggaran Tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berjumlah sebesar Rp. 11.282.042.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 11.239.219.385,00,- (99,62%). Adapun untuk rincian anggaran dan realisasi belanja dapat diamati melalui uraian grafik berikut:

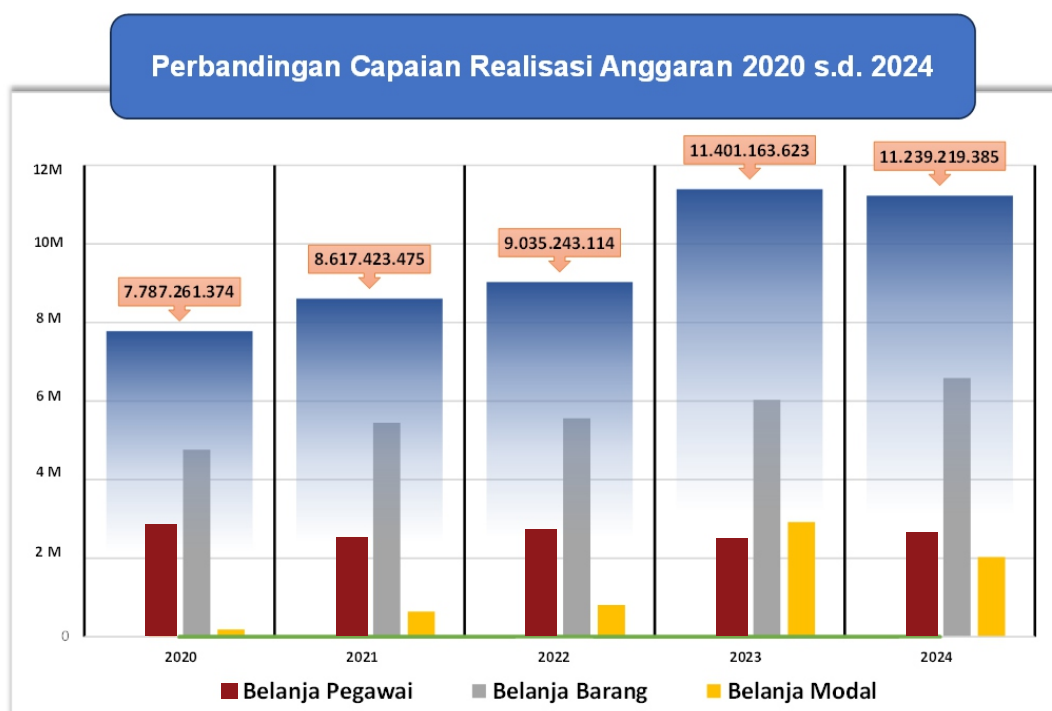


Berdasarkan data yang diuraikan terkait realisasi anggaran pada grafik diatas, diketahui persentase realisasi anggaran sebesar pada tahun 2024 adalah sebesar 99,62%. Persentase ini merupakan persentase realisasi anggaran tertinggi yang diperoleh selama

periode 2021-2024. Adapun untuk rincian data perbandingan Pagu anggaran dan Realisasi selama 4 tahun terakhir, dapat diamati melalui tabel dan grafik berikut.

PERIODE T.A.	PAGU	REALISASI	%
2020	7.964.299.00	7.787.261.374	97,78
2021	8.792.697.000	8.617.423.475	98,01
2022	9.126.195.000	9.035.245.114	99,00
2023	11.472.799.000	11.401.163.623	99,38
2024	11.282.042.000	11.239.219.385	99,62

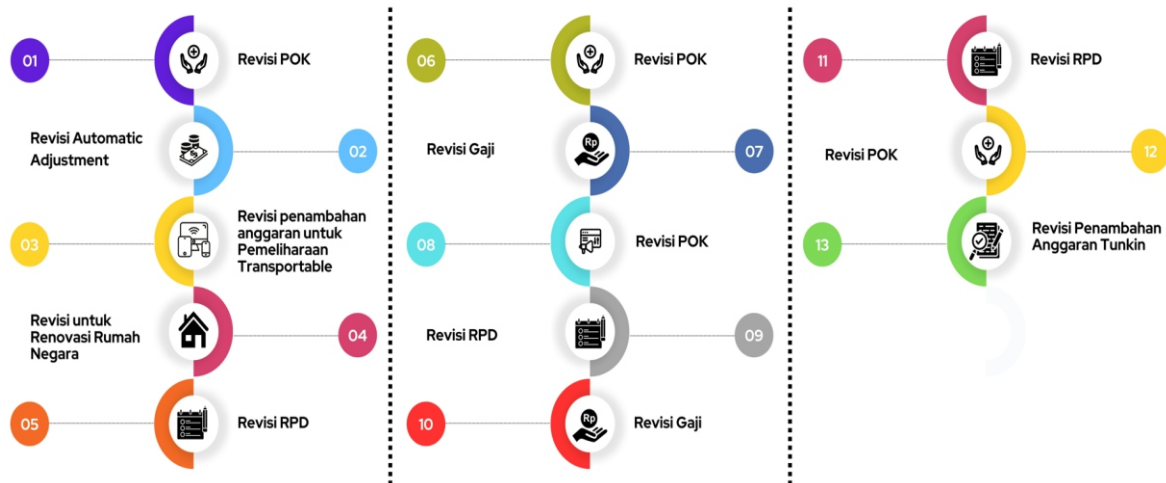
TABEL DATA PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA



Selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 terdapat 13 kali revisi anggaran yang terjadi, untuk rincian revisi

anggaran tersebut diuraikan secara rinci melalui grafik sebagai berikut:

Revisi Anggaran 2024



Implementasi Budaya BerAKHLAK

- Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan nilai kinerja anggaran UPT berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Nilai Berorientasi Pelayanan terlihat dari upaya UPT untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip Akuntabel diterapkan dengan mencatat dan melaporkan penggunaan anggaran secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana digunakan.
- Selain itu, nilai Harmonis diwujudkan melalui komunikasi yang baik antara UPT dan stakeholder, menciptakan kolaborasi yang efektif dalam pengelolaan anggaran. Sikap Loyal mendorong pegawai untuk berkomitmen pada tugas mereka dalam menjaga integritas penggunaan anggaran. Dengan bersikap Adaptif, UPT dapat menyesuaikan strategi pengelolaan anggaran sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang ada. Selanjutnya, prinsip Kolaboratif mendorong kerja sama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan anggaran yang efektif.
- Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, diharapkan kinerja anggaran UPT dapat meningkat, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN NILAI KINERJA ANGGARAN UPT

Pelaksanaan kegiatan nilai kinerja anggaran UPT memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran publik. Dengan adanya penilaian kinerja anggaran, UPT dapat lebih fokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, karena UPT dituntut untuk memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih baik tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan kepercayaan dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan nasional.

13. IK – Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA

Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Pada tahun 2024 Hasil Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja atas Pelaporan Keuangan Tahun

2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mendapatkan nilai akhir 100 dengan target 100 sehingga realisasi persentase capaian adalah 100 %

TABEL PEMBANDINGAN CAPAIAN 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	80	100	125%
	2024	100%	100%	100%

Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengakses informasi yang diperlukan. Prinsip Akuntabel diterapkan melalui pencatatan dan pelaporan yang transparan, memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, nilai Harmonis tercermin dalam kerja sama yang baik antara tim keuangan dan pihak-pihak terkait dalam menyusun laporan, menciptakan suasana kolaboratif yang

produktif. Sikap Loyal mendorong pegawai untuk berkomitmen dalam menjaga integritas dan kualitas laporan keuangan. Dengan bersikap Adaptif, tim keuangan dapat menyesuaikan metode pelaporan dengan perkembangan regulasi dan teknologi terkini. Terakhir, prinsip Kolaboratif mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, diharapkan kualitas pelaporan keuangan UAKPA dapat meningkat, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN NILAI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

Dengan adanya penilaian terhadap kualitas pelaporan keuangan UAKPA dituntut untuk menyusun laporan yang lebih akurat dan tepat waktu, yang pada gilirannya memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas laporan keuangan juga berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemerintah, karena data yang akurat dan transparan memungkinkan evaluasi kinerja program dan kegiatan secara efektif. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi anggaran.

BENCHMARKING DENGAN UPT SETARA – UPT PALANGKARAYA

KRITERIA PEMBANDING	BALMON SPEKTRUM FREKUENSI BANJARMASIN	BALMON SPEKTRUM FREKUENSI PALANGKARAYA
Luas Wilayah	38.744 km ²	153.444 km
Jumlah Kab./Kota	13 Kab./Kota	14 Kab./Kota
Jumlah PNS	17 Pegawai	20 Pegawai
Pagu Anggaran	Rp. 11.282.042.000	Rp. 12.550.283.000
Realisasi Anggaran	Rp. 11.239.219.385	Rp. 12.481.515.945
Presentase Realisasi Anggaran	99,62 %	99,45 %

PERBANDINGAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA						
Indikator Kinerja	Balmon Banjarmasin		Balmon Palangkaraya		Selisih Capaian	Keterangan
	Target	Capaian	Target	Capaian		
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	-	-
Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	117,50%	100%	100%	17,50%	Balmon Banjarmasin lebih tinggi capaiannya sebesar 17,50%
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%	-	-
Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/perangkat Telekomunikasi	93%	100%	93%	100%	-	-
Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100%	95%	100%	-	-
Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	134,17%	100%	262,85%	128,68%	Balmon Palangkaraya lebih tinggi capaiannya sebesar 128,68%
Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%	100%	-	-
Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	-	-
Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	145%	100%	100%	45%	Balmon Banjarmasin lebih tinggi capaiannya sebesar 45%
ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKLAN	100%	142,50%	100%	127,25%	15,25%	Balmon Banjarmasin lebih tinggi capaiannya sebesar 15,25%
Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%	100%	100%	100%	-	-
Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,89%	90,43%	98,39%	96,56%	6,13%	Balmon Palangkaraya lebih tinggi capaiannya sebesar 6,13%
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100	100	100	100	-	-

Dapat dijelaskan dari hasil tabel perbandingan capaian realisasi tersebut perbedaan capaian kemungkinan besar disebabkan beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional di masing-masing UPT diantaranya :

- Jumlah target yang ditetapkan berbeda untuk masing-masing UPT : Setiap UPT memiliki jumlah target yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing. Hal ini dapat mempengaruhi hasil akhir yang dicapai, di mana UPT dengan target lebih tinggi mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam pencapaian.
- Sumber Daya Manusia Perbedaan dalam jumlah dan kompetensi pegawai di masing-masing UPT dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai target operasional. Fasilitas dan Teknologi : Ketersediaan fasilitas dan teknologi monitoring yang berbeda juga dapat berkontribusi pada efektivitas operasional. UPT yang memiliki peralatan modern cenderung lebih efisien dalam melakukan pemantauan dan penanganan gangguan.

- Pengelolaan Anggaran : Kebijakan dan strategi pelaksanaan masing-masing UPT mengelola anggaran dan sumber daya keuangan juga berperan penting dalam pencapaian kinerja. UPT yang mampu mengelola anggaran dengan baik akan lebih efektif dalam menjalankan program-program mereka.
- Kondisi Geografis dan Demografis : Wilayah kerja masing-masing UPT memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kepadatan penduduk dan kompleksitas penggunaan frekuensi radio. Dan benchmarking ini bertujuan untuk saling belajar dari praktik terbaik guna meningkatkan layanan dan pengelolaan spektrum frekuensi radio di masing-masing wilayah kerja. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi capaian, kedua UPT dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan

B.CAPAIAN KINERJA LAINNYA

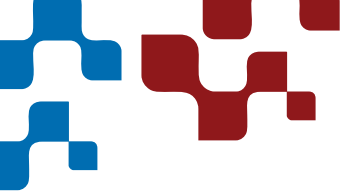
1. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah salah satu indikator kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dengan target pada tahun 2024 sebanyak 1 dokumen. Guna berjalan dengan tertibnya administrasi BMN maka perlu adanya pengelolaan yang berjalan baik sesuai aturan yang berlaku. Adapun pengelolaan tersebut dijalankan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi keluar masuk BMN dan melakukan sinkronisasi dengan KPKNL selaku pengelola BMN. Berdasarkan data pada tahun 2024 total BMN di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berjumlah sebanyak 610 unit, Adapun untuk rincian dari BMN tersebut terdiri atas:

a) Tanah	3 unit (1.776 m ²)
b) Gedung dan bangunan	6 unit
c) Rumah negara	2 unit
d) Bangunan air	1 unit

e) Alat besar	7 unit
f) Alat angkutan bermotor	10 unit
g) Peralatan dan mesin	577 unit
h) Aset tak berwujud	4 unit

Terdapat transaksi penambahan jumlah BMN sebanyak 42 unit yang berasal dari belanja modal. Adapun Surat Penetapan Status Penggunaan (PSP) pada tahun 2024 diusulkan sejumlah 54 unit yang terdiri atas 11 unit BMN pembelian tahun lalu dan 41 unit BMN pembelian tahun 2024. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku tercapai sesuai target yaitu 1 dokumen laporan pengelolaan BMN.



Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dalam pengelolaannya bukan hanya mencatat barang saja, mengingat tanggung jawab pengurusan dan proses penatausahaan barang bukanlah suatu yang mudah di laksanakan, perlu adanya kerjasama tim dalam proses pengelolaannya yang terdiri dari berbagai kegiatan

seperti pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, serta pengamanan atas BMN. Adapun rincian data terkait kondisi BMN yang dikelola dapat diamati melalui tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH	BAIK	RUSAK
Tanah	m ²	1.776	1.776	0
Gedung dan Bangunan	Unit	6	6	0
Rumah Negara	Unit	2	2	0
Bangunan Air	Unit	1	1	0
Alat Besar	Unit	7	7	0
Alat Angkutan Bermotor	Unit	10	10	0
Peralatan dan Mesin	Unit	577	488	89
Aset Tak Berwujud	Unit	4	4	0
TOTAL	UNIT	610	512	89

Berdasarkan data yang dimiliki berkenaan dengan kondisi BMN diatas, diketahui terdapat beberapa barang yang kondisinya rusak berat. Guna menindaklanjuti hal tersebut, sudah dilakukan usulan penjualan ke Seditjen SDPPI dengan Nomor 890/BALMON.63/PL.04.01/12/2024 pada tanggal 10 desember 2024. Adapun usulan penjualan BMN tersebut berupa peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000,-. Pada tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

- Penghapusan BMN berupa Material Bongkaran Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen pada 26 Juli 2024, terjual dengan nilai Rp. 2.625.000,-
- Penghapusan BMN berupa Material Bongkaran Renovasi Fasad pada 19 Agustus 2024, terjual dengan nilai Rp. 50.000,-





2. PENGHAPUSAN ARSIP TERDAMPAK BENCANA

Pada Pada hari Kamis, 18 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, terjadi insiden robohnya Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen (Rumah Dinas I) yang diperoleh pada tahun 2005. Bangunan tersebut beralamat di Jl. Pramuka, Komplek Rahayu Pembina IV, RT 16/RW 02, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rumah dinas ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan dan

pengamanan arsip Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin, dengan arsip yang tercipta sejak tahun 2006 hingga 2021. Dengan terjadinya insiden tersebut mengakibatkan arsip yang tersimpan mengalami kerusakan dikarenakan bangunan yang roboh merupakan bangunan rumah panggung yang berdiri di atas lahan gambut, sehingga seluruh bangunan dan isinya amblas ke dalam air.



Dokumentasi Bangunan Roboh pada tanggal 18 Januari 2024



Dokumentasi Bangunan Roboh pada tanggal 18 Januari 2024



Dokumentasi Bangunan Roboh pada tanggal 18 Januari 2024



Dokumentasi Bangunan Roboh pada tanggal 18 Januari 2024

TERKAIT BMN (RUMAH NEGARA) YANG MENGALAMI ROBOH:

- **Tanggal 22 Januari 2024**

Melakukan pemasangan pita peringatan keselamatan di sekeliling bangunan yang roboh dan pemasangan papan pemberitahuan : “Gedung ini akan direnovasi”;

- **Tanggal 22 Januari 2024**

telah berkoordinasi pertama ke bagian KPKNL Banjarmasin terkait tindakan yang seharusnya dilaksanakan beserta dengan prosedurnya dan output dari koordinasi KPKNL Banjarmasin diarahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas

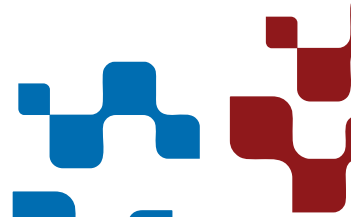
PUPR Kota Banjarmasin untuk mengeluarkan surat penilaian analisa kerusakan rumah negara yang disertai dengan rincian biaya pembangunan rumah negara baru;

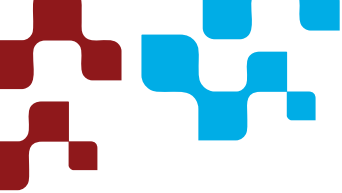
- **Hasil koordinasi dengan Dinas PUPR**

Kota Banjarmasin menerbitkan surat pada tanggal 31 Januari 2024 tentang Surat Analisa Penilaian Dinas PUPR Kota Banjarmasin dikeluarkan;

- **Tanggal 05 Februari 2024**

Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin melakukan koordinasi dengan Tim BMN Ditjen SDPPI dan Biro Keuangan Kemenkominfo;





- **Tanggal 20 Februari 2024**

membuat BA penelitian/penilaian BMN berupa rumah negara dengan merubah kondisi menjadi rusak berat;

- **Tanggal 14 Maret 2024**

menyampaikan usulan penghapusan BMN berupa rumah negara yang disertai dengan penjualan material bongkaran;

- **Tanggal 11 Juni 2024**

dikeluarkan surat Persetujuan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara yang disertai dengan penjualan material bongkaran dari KPKNL Banjarmasin a.n. Menteri Keuangan;

- **Tanggal 02 Juli 2024**

Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin mengajukan permohonan lelang rumah negara golongan I Tipe C permanen yang ditujukan kepada KPKNL Banjarmasin;

- **Tanggal 16 Juli 2024**

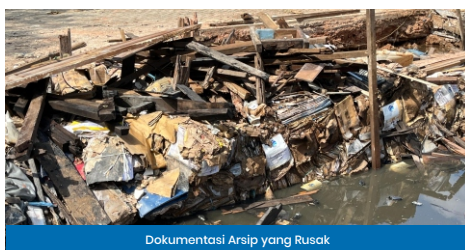
ditetapkan jadwal lelang oleh KPKNL Banjarmasin;

- **Tanggal 26 Juli 2024**

dilaksanakan lelang material bongkaran dan didapatkan pemenang lelangnya;

- **Tanggal 07 s.d 10 Agustus 2024**

dilakukan pembongkaran puing bangunan oleh pemenang lelang.



TERKAIT ARSIP YANG TERTIMBUN DAN TERENDAM DI PUING BANGUNAN

- Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin telah melaporkan ke Unit Kearsipan II pada tanggal 20 Februari 2024, dan dilanjutkan laporan dari UK II ke UK I Kementerian Kominfo;
- UK I dan UK II melakukan monitoring dan pendampingan langsung ke lokasi pada tanggal 25 Maret 2024 untuk mempersiapkan langkah-langkah pemusnahannya;

- Dikarenakan lamanya proses pengangkatan puing reruntuhan bangunan mengakibatkan arsip dari tahun 2006 s.d. 2021 yang tertimbun terlalu lama di dalam air/rawa sehingga dari arsip-arsip tersebut tidak ada yang bisa diselamatkan, hanya 1 % arsip yang masih bisa diidentifikasi (daftar arsip 2010 s.d. 2021 terlampir berdasarkan buku agenda surat masuk dan surat keluar, untuk arsip 2006 s.d. 2009 dikarenakan masih menggunakan agenda manual sehingga dibuatkan daftar ikhtisar arsip;



- Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Polresta Banjarmasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah mendapat Surat Keterangan/Rekomendasi terhadap arsip-arsip yang mengalami *Force Majeure*;

Pada tanggal 10 September 2024 dilaksanakan kunjungan ke lokasi dari ANRI, UK I dan UK II untuk melakukan identifikasi terhadap arsip yang masih bisa diselamatkan. Setelah kunjungan tersebut dilaksanakan Rapat Pembahasan Kelengkapan Berkas Usul Musnah Arsip Force Majeure di Hotel Galaxi Banjarmasin. Hasil rapat tersebut tertuang dalam Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip Terdampak Bencana. Adapun point dari hasil kunjungan dan rapat tersebut antara lain:

- Arsip terdampak bencana meliputi : laporan keuangan, kwitansi pembayaran bendahara, Surat Tugas, Surat Penunjukan Pelaksana Harian, berkas perjalanan dinas, pengiriman berkas ISR, laporan kegiatan pelaksanaan tugas, surat undangan, laporan monitoring rutin, surat-surat bersifat administrasi penunjang tugas pokok dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin;

- Arsip terdampak bencana dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakan dari ringan, sedang dan berat. Hanya 2 nomor arsip yang masuk ke dalam tingkat kerusakan ringan dan akan disimpan menjadi arsip inaktif. Sedangkan lainnya masuk kategori tingkat kerusakan berat (lebih dari 50%);
- Kondisi arsip kategori rusak berat yang berhasil diangkat sebanyak 0,4 meter linier (yang teridentifikasi);
- Berdasarkan nilai guna dari arsip yang diidentifikasi tidak bernilai guna kesejarahan sehingga tidak perlu dilakukan restorasi arsip karena arsip vital tersimpan di brankas pada Unit Pengolah (tidak terdampak bencana);
- Adapun jumlah arsip yang terdampak rusak berat sebanyak 114 meter linier sesuai dengan surat penawaran dari pihak ketiga PT Permata Ghara Nusantara tanggal 11 Januari 2023.





Mengingat kondisi fisik arsip yang sudah mengeras, berjamur dan berlumpur dipertimbangkan untuk dapat segera dimusnahkan, dengan alasan:

Arsip tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dari Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin;

Jika tetap disimpan arsip tersebut akan musnah dengan sendirinya;

Keberadaan arsip tersebut dapat membahayakan kesehatan orang yang berada disekitarnya;

Arsip terdampak bencana tahun 2006 s.d 2018 sudah habis retensinya dan berketerangan akhir musnah berdasarkan Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman JRA tahun 2019 s.d. 2021 belum habis masa retensinya namun sudah tidak dapat diselamatkan;

Arsip yang terdampak bencana tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara;

Arsip yang terdampak bencana tidak memiliki nilai guna kesejarahan.



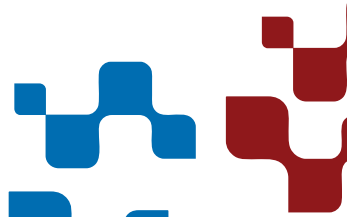
Kegiatan Pemusnahan Arsip dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 di halaman kantor Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin, dengan cara dibakar dan dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip tidak dikenali lagi dan dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip Terdampak Bencana. Kegiatan pemusnahan arsip

dihadiri secara daring oleh para anggota Tim Panitia Penilai Arsip Terdampak Bencana, perwakilan Biro Hukum sebagai unit kerja bidang hukum, perwakilan Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja bidang pengawasan, perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Arsip Nasional Republik Indonesia.

PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP TERDAMPAK BENCANA YANG TERIDENTIFIKASI SECARA SIMBOLIS DENGAN CARA DIBAKAR OLEH KEPALA BALMON BANJARMASIN, KASUBBAG UMUM DAN PARA KETUA TIM KERJA



BANJARMASIN, 17 SEPTEMBER 2024



3. PENERIMAAN PENGHARGAAN INSTANSI TERBAIK KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PPNS TERBAIK

Pada akhir Tahun Anggaran 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menerima penghargaan sebagai Instansi Terbaik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terbaik dari Polda Kalimantan Selatan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi dalam menjalankan tugas serta fungsi PPNS dalam penegakan hukum di Indonesia. Penghargaan ini juga secara khusus diberikan kepada Guntur Siburian, Ketua Tim Penertiban Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (APT),

atas integritas, profesionalisme, dan komitmennya dalam melaksanakan tugas, terutama dalam pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik).

Melalui penghargaan ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berharap dapat terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan profesional.



Penerimaan Penghargaan Instansi Terbaik Penegakan Hukum Wasmatlitrik



Penerimaan Penghargaan PPNS Terbaik Penegakan Hukum Wasmatlitrik

PIAGAM PENGHARGAAN



4. MANAJEMEN RESIKO PENERAPAN MANAJEMEN

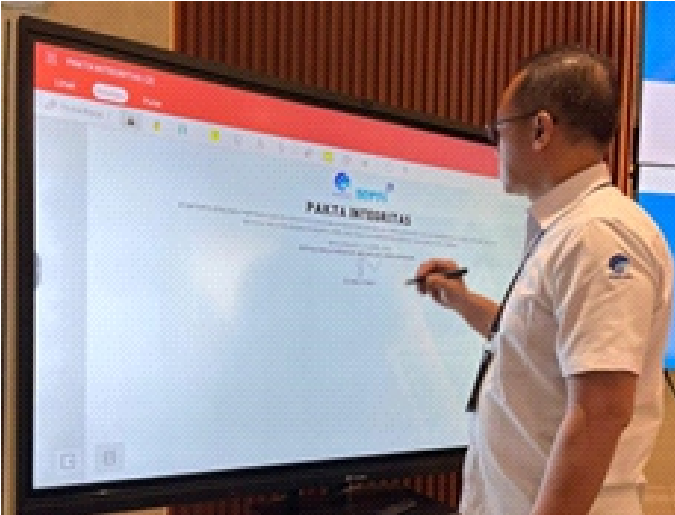
NO.	TARGET KINERJA	POTENSI KEJADIAN/KENDALA	DAMPAK	MITIGASI RESIKO
1.	Tercapainya PK Presentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT (95%)	Tidak Berfungsinya Perangkat <i>Transportable</i> sebagai akibat terputusnya jaringan koneksi internet	Penurunan Kinerja	Menyediakan jaringan internet dengan performa yang baik berdasarkan hasil pengecekan performansi jaringan sesuai log MRTG (Multi Route Traffic Graphier) yang menggambarkan performansi jaringan
2.	Tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024 (89.89)	Tertundanya penyelesaian pekerjaan rehabilitasi gedung mess kantor sebanyak 3 unit sebagai akibat terjadinya kerusakan parah pada salah satu gedung mess kantor yang rencana semula akan di renovasi sehingga harus dibangun baru dengan anggaran biaya yang harus diperhitungkan kembali oleh konsultan	Penurunan Kinerja	Menyesuaikan kegiatan pekerjaan rehabilitasi mess kantor semula sebanyak 3 unit menjadi 1 unit sesuai revisi DIPA Triwulan 3

5. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Dalam rangka menuju terciptanya penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani selaras dengan pedoman pembangunan zona integritas (ZI) sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan sebagai tindaklanjut Nota Dinas Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Nomor: 182/DJSDPPI.3/SP.02.09/02/2024 tanggal 7 Februari 2024, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah memulai pencaanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Balai Monitor Banjarmasin. Pencanaungan pembangunan

Zona Integritas dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024, dengan dilakukannya penandatanganan pakta integritas bagi seluruh pejabat dan staf yang ada di lingkungan kantor Balmon Banjarmasin. Lebih lanjut, tim kerja Zona Integritas dibentuk berdasarkan SK Kabalmon Banjarmasin nomor 28 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024.

Adapun dokumentasi kegiatan tersebut dapat diamati melalui gambar dibawah ini.



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah berkomitmen untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima melalui penerapan zona integritas. Sebagai salah satu bentuk sosialisasi adanya zona integritas di lingkungan kantor Balmon Banjarmasin memasang informasi berupa banner maklumat pelayanan di ruang pelayanan. Lebih

lanjut lagi sebagai bentuk komitmen peningkatan pelayanan prima, kantor Balmon Banjarmasin telah secara bertahap telah berupaya untuk menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan seperti ruang pelayanan, ruang konsultasi dan asistensi, serta penyediaan fasilitas kursi roda. Hal tersebut dapat diamati melalui beberapa dokumentasi pada gambar di bawah ini.



Ruang Pelayanan, Ruang Konsultasi dan Asistensi dan Ruang Tamu



Pojok inspirasi dan fasilitas disabilitas



Banner Maklumat Pelayanan

Guna memperkuat pemahaman tentang implementasi Zona Integritas (ZI), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mengundang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah berpengalaman dan berprestasi dalam pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), untuk mengadakan sesi berbagi pengalaman (*sharing session*). Kegiatan ini

bertujuan untuk menginternalisasi penerapan ZI di lingkungan Balmon Banjarmasin secara optimal.

Adapun dokumentasi kegiatan *sharing session* tersebut dapat diamati melalui gambar di bawah ini, dilanjutkan dengan data progres pembangunan zona integritas kantor Balmon Banjarmasin.



Kegiatan Sharing Session ZI

PROGRES PEMBANGUNAN ZI BALMON BANJARMASIN TAHUN 2024

No.	Status Kerja	Nilai Pengungkit	Nilai Hasil	Nilai Total	Tahap	Status
1.	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN	49.16	39.61	88.77	Penilaian Mandiri	Tidak Lulus

6. PENGUKURAN BERSAMA DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI, DIREKTORAT STANDARDISASI PPI, BBPPT, DAN PT. ZTE INDONESIA DI KAB. BANJAR DALAM RANGKA PENYELESAIAN GANGGUAN FREKUENSI RADAR CUACA MILIK BMKG BANJARMASIN

Pengukuran ini merupakan tindak lanjut penanganan gangguan frekuensi radar cuaca milik BMKG Banjarmasin yang telah dilaksanakan Tim Penanganan Gangguan Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin pada akhir tahun 2023. Guna dapat memastikan sumber gangguan, perlu adanya pengukuran secara *conducted* pada perangkat *Remote Radio Unit* (RRU) milik PT. ZTE Indonesia yang menjadi suspect pengganggu oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) dengan melibatkan 2 (dua) direktorat Ditjen SDPPI, yakni Direktorat Pengendalian SDPPI dan Direktorat Standarisasi PPI serta

pihak PT. ZTE Indonesia sebagai pemilik perangkat dan PT. Telkomsel sebagai pengguna perangkat pada site MTP420_Pasar Berlian di Kab. Banjar

Adapun hasil kegiatan tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran secara *conducted* oleh BBPPT terukur adanya pancaran harmonisa dari perangkat merk ZTE Type ZXSDR R8894E M1821 milik PT. ZTE Indonesia dengan nilai ambang batas *spurious emissions* masih sesuai Permen Kominfo No.13 Tahun 2021.



Gambar Pengukuran Bersama Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Standardisasi PPI, BBPPT, UPT Banjarmasin, UPT Pontianak, PT. Telkomsel, dan PT. ZTE Indonesia pada site rooftop milik Telkomsel



Gambar Pengukuran Bersama Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Standardisasi PPI, BBPPT, UPT Banjarmasin, UPT Pontianak, PT. Telkomsel, dan PT. ZTE Indonesia pada site rooftop milik Telkomsel

7. POSKO PEMANTAUAN SFR DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN

Posko Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dalam rangka Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dilaksanakan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin untuk mengantisipasi terjadinya gangguan frekuensi radio yang merugikan dan membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Adapun pita frekuensi yang dimonitor yakni pita frekuensi bergerak penerbangan VHF (108-137 MHz), frekuensi

Repeater VHF ORARI (144-148 MHz), Repeater VHF RAPI (142-143 MHz) serta frekuensi lain yang digunakan untuk menjaga keamanan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2024.

Berdasarkan hasil pemantauan SFR, tidak terpantau adanya gangguan interferensi pada frekuensi yang digunakan untuk pengamanan Hari Raya Idul Fitri 2024.



Posko Pemantauan SFR dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2024

8. MONITORING SFR DALAM RANGKA PILKADA 2024 DI KABUPATEN BANJAR



Monitoring SFR dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024

9. RAPAT KLARIFIKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO SIARAN FM DALAM RANGKA TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS DAN KARAKTERISTIK PEMANCAR RADIO SIARAN FM

Sesuai Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 68 ayat (1) huruf g bahwa pengakhiran masa laku ISR atas dasar pencabutan dilakukan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan hasil monitoring Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk mengantisipasi terjadinya pencabutan ISR kepada penyelenggara radio siaran FM, maka pada tanggal 7 Nopember 2024 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin melaksanakan kegiatan Rapat klarifikasi penggunaan frekuensi radio siaran FM. Dalam pelaksanaan kegiatan rapat klarifikasi penggunaan frekuensi radio siaran FM di wilayah

Kalimantan Selatan ini telah diundang 25 penyelenggara radio siaran FM yang termonitor tidak mengudara (off air) di wilayah Kalimantan Selatan. Tingkat kehadiran peserta pada undangan ini adalah sebesar 84% dari total 25 penyelenggara yang diundang atau sebanyak 21 penyelenggara. Dari 21 penyelenggara tersebut yang menyatakan sanggup untuk mengudara (on air) kembali adalah 19 penyelenggara radio siaran FM, sedangkan 2 penyelenggara radio siaran FM lainnya telah melakukan pengudangan ISR dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penyelenggara	Sanggup untuk mengudara (on air)	Pengundangan ISR
1.	LPPL Radio Swara Murakarta FM	✓	
2.	LPPL Radio Siaran Pemda Ijejele Kab. Barito Kuala	✓	
3.	Radio Noor Amien Alabio, PT.	✓	
4.	Radio Gelora Inti Sehati, PT.	✓	
5.	Radio Sanggam Balangan, PT.	✓	
6.	Radio Citra Posindo, PT.	✓	
7.	Radio Dua Sahabat, PT.	✓	
8.	Radio Suara Kayangan, PT.	✓	
9.	Swara Sehati Batulicin, PT.	✓	
10.	Swara Sehati Binuang, PT.	✓	
11.	LPP RRI Balangan	✓	
12.	Perkumpulan Radio Komunitas Dakwah Ash-Shiratal Mustaqim	✓	
13.	Swara Sehati Murung Pundak, PT.	✓	
14.	Swara Sehati Musthofa, PT.	✓	
15.	Radio Daarul Mustofa, PT.	✓	
16.	Radio Citra Mustika Murakarta, PT.	✓	
17.	Radio Citra Mustika Bersujud, PT.	✓	
18.	Radio Donglay Nusantara, PT.	✓	
19.	Radio Swara Tapin Raya, PT.	✓	
20.	Radio Gema Meratus, PT.		✓
21.	Radio Swara Agung Lestari, PT.		✓



Sambutan dan Pembukaan oleh Kasubbag Umum
Pada Rapat Klarifikasi Penggunaan Frekuensi Radio Siaran FM



Foto Bersama para Undangan Rapat Klarifikasi
Penggunaan Frekuensi Radio Siaran FM

10. MONITORING FREKUENSI DALAM RANGKA PERINGATAN HARI IBU (PHI) KE-96 TAHUN 2024 DI KABUPATEN BARITO KUALA

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Ditjen SDPPI Nomor : 5328/DJSDPPI.1/HM.03.06/11/2024 tanggal 29 November 2024 hal Permohonan Dukungan Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-96 Tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin melaksanakan giat monitoring frekuensi untuk mendukung acara peluncuran awal (soft launching) Ruang Bersama Merah Putih (RBMP) di Kantor Kecamatan Alalak, di Jl. Trans Kalimantan Km. 2,5 No. 10 Handil Bakti, Kab. Barito Kuala.

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pemantauan spektrum frekuensi radio yang akan digunakan pada puncak acara PHI untuk meminimalisir

gangguan yang mungkin terjadi. Pemantauan spektrum frekuensi radio dilakukan pada pita frekuensi seluler dan frekuensi Broadband Wireless Access (BWA).

Adapun hasil yang dicapai yakni pelaksanaan puncak acara kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-96 di Kab. Barito Kuala dapat berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti serta tidak terdapat adanya gangguan frekuensi.



Monitoring frekuensi dalam rangka dukungan acara peluncuran awal (soft launching) Ruang Bersama Merah Putih (RBMP) pada Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-96 Tahun 2024 di Kantor Kecamatan Alalak



Monitoring frekuensi dalam rangka dukungan acara peluncuran awal (soft launching) Ruang Bersama Merah Putih (RBMP) pada Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-96 Tahun 2024 di Kantor Kecamatan Alalak

11. POSKO MONITORING DALAM RANGKA LIBUR NATARU 2024 DI BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARMASIN DAN PELABUHAN TRISAKTI BANJARMASIN

Posko Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dalam rangka Libur Natal dan Tahun Baru 2024 dilaksanakan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin di bawah pengawasan Direktorat Pengendalian SDPPI untuk mengantisipasi terjadinya gangguan frekuensi radio yang merugikan dan membahayakan keselamatan jiwa manusia dan memberikan informasi terkait kualitas sinyal jaringan komunikasi seluler dan dinas komunikasi lainnya.

Adapun pita frekuensi yang dimonitor yakni pita frekuensi marabahaya seperti, frekuensi penerbangan, frekuensi maritim, radar cuaca, dsb. Serta pemantauan terhadap layanan seluler yang ada di sekitar wilayah bandara dan Pelabuhan.

Berdasarkan hasil pemantauan SFR, tidak terpantau adanya gangguan interferensi pada frekuensi penerbangan, radar cuaca, maritim, serta frekuensi krusial lainnya, dari hasil sampling wawancara terkait

layanan seluler selama libur Natal dan Tahun Baru, rata-rata jawaban adalah sangat baik, layanan seluler lancar dan tidak ada kendala.



Posko Monitoring SFR dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru Tahun 2024 di wilayah Pelabuhan Penumpang Trisakti



Posko Monitoring SFR dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru Tahun 2024 di wilayah Pelabuhan Penumpang Trisakti



Posko Monitoring SFR dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru Tahun 2024 di wilayah Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin

12. PELAKSANAAN HARI BHAKTI POSTEL KE-79

Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Postel ke-79 Tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mengadakan kegiatan Donor Darah pada tanggal 26 September 2024. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Balmon Banjarmasin bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Banjarmasin. Dengan mengusung tema "Donor Darah, Jadilah Pahlawan",

kegiatan ini mendapat antusiasme yang tinggi dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sekitar, anggota organisasi amatir radio, serta stakeholder terkait. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial serta membantu memenuhi kebutuhan darah bagi yang membutuhkan.



BAB IV PENUTUP

04



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah kerjanya. Spektrum Frekuensi radio berperan krusial dalam berbagai layanan komunikasi, seperti telekomunikasi, penyiaran, dan sistem navigasi. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan penggunaan spektrum yang tertib dan bebas dari gangguan yang dapat merugikan pengguna, baik individu, instansi pemerintah, maupun sektor industri. Untuk mencapai kinerja tersebut, dibutuhkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2024, telah ditetapkan 13 indikator kinerja yang mencakup dua sasaran program. Perjanjian kinerja ini digunakan sebagai pedoman kerja sekaligus prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh telah memenuhi seluruh target yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Capaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan dedikasi tinggi seluruh jajaran yang bertugas. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja signifikan yang berhasil dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin:

1. **Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio**

Kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan sangat memuaskan. Data yang diperoleh melalui kegiatan monitoring ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio di masa yang akan datang.

2. **Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio**

Kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu menyelesaikan seluruh aduan terkait gangguan spektrum frekuensi radio yang diterima. Capaian ini sangat berpengaruh untuk memastikan tidak ada gangguan yang merugikan berbagai pihak.

3. **Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi**

Kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio serta alat/perangkat telekomunikasi berhasil melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini dapat diperoleh melalui kegiatan penertiban yang intensif, agar dapat memastikan tidak adanya frekuensi ilegal serta APT yang tidak bersertifikat.

4. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat

Kegiatan sosialisasi pelayanan publik telah dilaksanakan dengan sangat baik dan berhasil mengulang kesuksesan pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini melibatkan pengguna frekuensi dari seluruh kabupaten/kota yang terdapat dalam wilayah kerja. Sementara itu, untuk Survei Kepuasan Masyarakat berhasil memperoleh capaian dengan predikat mutu layanan sangat baik dengan IIPP sebesar 3,93 dan IKM sebesar 3,92.

5. Pengelolaan keuangan

Kegiatan pengelolaan keuangan sendiri terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan. Capaian yang diperoleh menunjukkan hasil yang memuaskan dan mendapatkan persentase realisasi anggaran tertinggi selama periode 2020-2024.

Meskipun telah dapat mencapai seluruh target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan memperoleh beberapa prestasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin masih menghadapi berbagai macam kendala. Seperti kuantitas sumber

daya, kemudian dinamika teknologi yang bergerak begitu cepat, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Demi meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan:

1. **Penguatan Sumber Daya Manusia** melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang ada
2. **Peningkatan Teknologi** melalui pembaruan peralatan dan sistem monitoring untuk meningkatkan kualitas pengawasan
3. **Peningkatan Koordinasi** dengan melibatkan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola Spektrum Frekuensi Radio.
4. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan** terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selama proses kerja berlangsung, agar dapat menjaga kualitas capaian kinerja yang sudah dapat diperoleh sebelumnya.

Laporan Kinerja ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Pada LAKIN ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif, diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LAKIN ini. Demikian laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada serta dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.



KOMDIGI

DIREKTORAT JENDRAL
INFRASTRUKTUR DIGITAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Ramah, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

☎ 0511 - 3258346

✉ upt_banjarmasin@postel.co.id

📍 Jl. Pramuka No. 22 A Banjarmasin

🌐 [balmon_banjarmasin](#)